

STRATEGI ANTI-CENSORSHIP MOVEMENT DALAM MENYIKAPI KEBIJAKAN

SENSOR DI CINA TAHUN 2000-2013

SKRIPSI



Disusun Oleh:

Dwi Sofa Yuniarti

16323085

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

YOGYAKARTA

2021

**STRATEGI ANTI-CENSORSHIP MOVEMENT DALAM MENYIKAPI KEBIJAKAN
SENSOR DI CINA**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat Guna Memperoleh

Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh:

DWI SOFA YUNIARTI

NIM: 16323085

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2021

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

STRATEGI ANTI-CENSORSHIP MOVEMENT DALAM MENYIKAPI KEBIJAKAN SENSOR DI CINA

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional

Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya

Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-syarat

Guna Memperoleh Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional

Pada Tanggal

26 Januari 2021



Mengesahkan,
Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia
Ketua Program Studi



(Hangga Fathana, S.IP., B.Int.St., M.A)

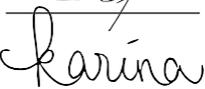
NIK. 123230101

Dewan Penguji:

1. Masitoh Nur Rohma, S.Hub.Int., M.A
2. Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A
3. Enggar Furi Herdianto, S.I.P., M.A
4. Dr. M Zulfikar Rakhmat, B.A., M.A., Ph.D

Tanda Tangan









HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Dwi Sofa Yuniarti
No. Mahasiswa : 16323085
Program Studi : Hubungan Internasional
Judul Skripsi : Strategi *Anti-Censorship Movement* Dalam Menyikapi Kebijakan Sensor di Cina

Melalui surat ini saya menyatakan bahwa:

1. Selama melakukan penelitian dan pembuatan laporan penelitian skripsi, saya tidak melakukan tindakan pelanggaran etika akademik dalam bentuk apapun, seperti penjiplakan, pembuatan skripsi oleh orang lain, atau pelanggaran lain yang bertentangan dengan etika akademik yang dijunjung tinggi Universitas Islam Indonesia. Karena itu, skripsi yang saya buat merupakan karya ilmiah saya sebagai peneliti, bukan karya jiplakan atau karya orang lain.
2. Apabila dalam ujian skripsi saya terbukti melanggar etika akademik, maka saya siap men犯罪 sanksi sebagaimana aturan yang berlaku di universitas Islam Indonesia.
3. Apabila di kemudian hari, setelah saya lulus dari Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia ditemukan bukti secara meyakinkan bahwa skripsi ini adalah karya jiplakan atau karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang ditetapkan Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 19 Januari 2021

Yang menyatakan,



(Dwi Sofa Yuniarti)

HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin

Karya sederhana ini saya persembahkan untuk;

Kedua Orang Tua

Terimakasih untuk segala doa, cinta, kasih sayang, dan dukungan penuh yang selalu mengiringi langkah penulis. Terimakasih untuk selalu ada dan siap sedia dalam setiap keadaan. Perjuangan kalianlah yang telah mengantarkan penulis hingga sampai titik ini.

Keluarga

Terimakasih atas segala doa, motivasi dan nasehat yang senantiasa di berikan kepada penulis.

PRAKATA



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabaraa Kaatuh

Segala puja dan puji syukur tercurahkan kepada Allah SWT, karena atas limpahan karunia dan rahmatnya penulis bisa menyelesaikan penelitian ini. Tak lupa, sholawat serta salam kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti.

Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian penelitian pada skripsi ini, tak lepas dari dukungan banyak pihak melalui bantuan, motivasi, bimbingan, serta nasehat yang selalu diberikan kepada penulis. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak (Daryadi) dan Ibu (Haryanti), atas dukungan moril maupun materil, sehingga penulis bisa menyelesaikan penelitian akhir ini.
2. Keluarga, terutama kakak dan adik perempuan satu-satunya, atas doa dan dukungannya.
3. Bapak Dr. M Zulfikar Rakhmat, B.A., M.A., Ph.D selaku dosen pembimbing skripsi atas segala bimbingan, arahan, saran, solusi, dan dukungan kepada penulis sehingga penelitian ini dapat selesai. Semoga Allah SWT membalas kebaikan bapak.
4. Teman-teman seperjuangan Nanda, Naila, Tika, Mella, Nailis, Retno dan Lina yang selalu memberikan dukungan dan semangat dalam menyelesaikan penelitian ini. terimakasih sudah menjadi pendengar yang baik ketika penulis mengalami kendala dalam penyelesaian penelitian.

5. Teman-teman Prestigious UII. Nanda, Naila, Tika, Mella, Syifa, dan lainnya.
Terimakasih telah menemani dan memberikan warna selama hidup bersama di Jogja.
Terimakasih atas doa, dukungan serta canda tawa yang sudah kita bagi bersama.
6. Teman-teman TPA Al Hidayah dan DHM yang telah memberikan banyak pelajaran, pengalaman, dan kebahagiaan selama di Jogja.
7. Seluruh dosen dan karyawan prodi Hubungan Internasional yang telah membimbing dan membantu penulis selama perkuliahan hingga penyelesaian penelitian akhir ini.
8. Seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini dengan tulus dan ikhlas. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian.



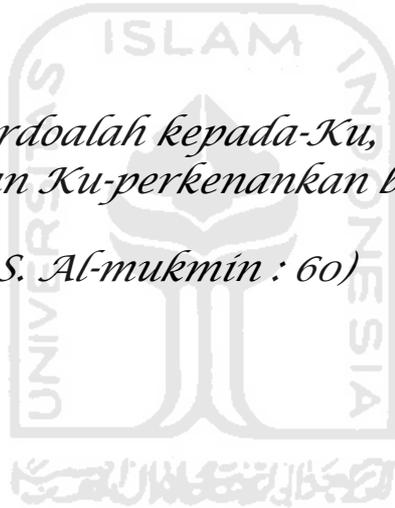
HALAMAN MOTTO

*“Intention is nothing without action,
but action is nothing without intention.
Progress happens when your intentions
and actions become the same thing.”*

(Steven Bartlett)

*“Berdoalah kepada-Ku,
niscaya akan Ku-perkenankan bagimu.”*

(QS. Al-mukmin : 60)



DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN	5
HALAMAN PERSEMBAHAN	6
PRAKATA	7
HALAMAN MOTTO.....	9
DAFTAR ISI	10
DAFTAR SINGKATAN	12
ABSTRAK	14
BAB I PENDAHULUAN	15
1.1 Latar Belakang	15
1.2 Rumusan Masalah.....	17
1.3 Tujuan Penelitian	18
1.4 Signifikansi Penelitian.....	18
1.5 Cakupan Penelitian	19
1.6 Tinjauan Pustaka	19
1.7 Landasan Konsep/Teori/Model	23
1.8 Metode Penelitian	25
A. Jenis Penelitian	25
B. Subjek dan Objek Penelitian	25
C. Metode Pengumpulan Data.....	26
D. Proses Pengumpulan Data	26
BAB II PEMBAHASAN	29
SENSOR DI CINA, SENSOR DALAM KONTEKS HAM DAN KEMUNCULAN ANTI-CENSORSHIP MOVEMENT	
<u>2.1</u> Penerapan dan Perkembangan Sensor di Cina	29
<u>2.2</u> Bentuk Penyimpangan Sensor terhadap nilai HAM	38
<u>2.3</u> Kemunculan <i>Anti-censorship movement</i> di Cina.....	41
<u>2.4</u> <i>Anti-censorship Movement</i> sebagai Jaringan Advokasi Transnasional	44
BAB III	48
ANALISIS UPAYA ANTI-CENSORSHIP MOVEMENT DALAM MENYIKAPI KEBIJAKAN CENSORSHIP DI CINA	48

3.1 <i>Information Politic</i>	48
3.2 <i>Symbolic Politic</i>	54
3.3 <i>Leverage Politic</i>	56
3.4 <i>Accountability Politics</i>	65
BAB IV	69
KESIMPULAN DAN SARAN	69
4.1. KESIMPULAN	69
4.2. SARAN	70
DAFTAR PUSTAKA	71



DAFTAR SINGKATAN

CNNIC	: <i>China Internet Network Information Center</i>
CCP	: <i>Chinese Communist Party</i>
HAM	: Hak Asasi Manusia
TAN	: <i>Transnational Advocacy Network</i>
VPN	: <i>Virtual Private Network</i>
IT	: <i>Information Technology</i>
NGO	: <i>Non-Governmental Organizations</i>
IGO	: <i>Inter-Governmental Organizations</i>
CCPPD	: <i>Chinese Communist Party Propaganda Department</i>
PKC	: Partai Komunis Cina
UU	: Undang-undang
IP	: <i>Internet Protocol</i>
CAC	: <i>The Cyberspace Administration of China</i>
UDHR	: <i>Universal Declaration of Human Right</i>
AS	: Amerika Seikat
USAID	: <i>The United States Agency for International Development</i>
CECC	: <i>Congressional Executive Commision in China</i>
GFA	: <i>Global Freedom Act</i>
GNI	: <i>Global Network Initiative</i>
NEA	: <i>State's Bureau of Near Eastern Affair</i>
ESF	: <i>Economic Support Fund</i>
HRDF	: <i>Human Rights and Democracy</i>

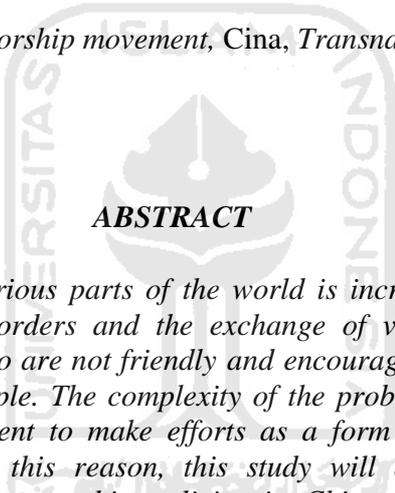
NERD	: <i>Near East Regional Democracy</i>
FOC	: <i>Freedom Online Coalition</i>
GIFT	: <i>Global Internet Freedom Task</i>
BBG	: <i>Broadcasting Board of Governors</i>
VOA	: <i>Voice of America</i>
RFA	: <i>Radio Free Asia</i>
OIF	: <i>Office of Internet Freedom</i>
OTF	: <i>Open Technology Fund</i>



ABSTRAK

Dewasa ini, penggunaan internet diberbagai belahan dunia kian meningkat. Kehadiran internet menjadikan pergerakan lintas batas negara dan pertukaran nilai-nilai secara global semakin mudah. Massifnya pengguna internet di Cina cukup menimbulkan kekhawatiran dan mendorong pemerintah Cina untuk menerapkan kebijakan *censorship* terhadap masyarakatnya. Kompleksitas permasalahan *censorship* akhirnya memicu *anti-censorship movement* untuk melakukan beberapa upaya sebagai bentuk perlawanan dalam menyikapi kebijakan *censorship* di Cina. Untuk itu, penelitian ini akan membahas mengenai bagaimana kemudian *anti-censorship movement* menyikapi kebijakan *censorship* di Cina. Penelitian ini akan menggunakan konsep *Transnational Advocacy Network (TAN)* untuk menjelaskan strategi yang digunakan oleh *anti-censorship movement* , dimana didalamnya terdapat tiga poin strategi yang berhasil dilakukan oleh *anti-censorship movement* yaitu *information politic, symbolic politic, dan leverage politic* dan satu yang belum terlaksana yaitu *accountability politic* . Keterbatasan *anti-censorship movement* dalam memperjuangkan isu yang mereka bawa belum berhasil membuat pemerintah Cina berkomitmen untuk merubah kebijakan sensor di Cina. Hal ini pula yang kemudian menjadi alasan strategi *accountability politic* belum dapat dilaksanakan.

Kata kunci: *censorship, anti-censorship movement, Cina, Transnational Advocacy Network (TAN)*



ABSTRACT

Nowadays, internet usage in various parts of the world is increasing. The presence of the internet makes movement across borders and the exchange of values globally easier. The massive number of internet users who are not friendly and encourage the Chinese government to impose policy censorship on its people. The complexity of the problem of censorship eventually becomes an anti-censorship movement to make efforts as a form of resistance in addressing censorship policies in China. For this reason, this study will discuss how then the anti-censorship movement responds to censorship policies in China. This research will use the concept of the Transnational Advocacy Network (TAN) to explain the strategies used by the anti-censorship movement, which there are three strategic points that have been successfully carried out by the anti-censorship movement, namely information politics, symbolic politics, and leverage politics and one that has not implemented, namely the politics of accountability. The limitations of the anti-censorship movement in fighting for the issues they bring have not succeeded in making the Chinese government commit to changing censorship policies in China. This is also the reason why political strategy accountability cannot be implemented.

Keywords: *Censorship, Anti-censorship movement, China, Transnational Advocacy Network (TAN)*

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dewasa ini, penggunaan internet di berbagai belahan dunia kian meningkat. Internet hadir sebagai bentuk revolusi di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Kehadiran internet menjadikan pergerakan lintas batas negara semakin mudah. Dengan internet, pertukaran gagasan antar negara dapat dilakukan hanya dengan melalui sebuah media tanpa harus melakukan perpindahan posisi dari satu negara ke negara lain. Berbagai aspirasi dan informasi semakin mudah diakses. Pergerakan sosial masyarakat semakin terbuka lebar. Fenomena ini dapat menjelaskan adanya pengglobalan nilai-nilai lokal dan sebaliknya, juga peningkatan berbagai isu-isu yang saat ini sedang marak diperjuangkan.

Masuknya nilai-nilai global ke tingkat lokal sebagai dampak dari internet itu sendiri membuat pemerintah Cina khawatir hal tersebut akan dapat menimbulkan aksi-aksi kolektif dan pemberontakan yang dapat mengganggu stabilitas negara. Karena internet sebagai bentuk kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dapat menjadi alat terbaik bagi pergerakan sosial untuk memperjuangkan isu yang mereka bawa. Kekhawatiran tersebut lalu semakin didorong dengan terjadinya peristiwa besar Cina Protes Pro Demokrasi di Lapangan Tiananment 1989. Protes besar itu menyebabkan banyak korban jiwa dan krisis internal Cina sehingga akhirnya memicu pemerintah secara bertahap melakukan pembatasan-pembatasan terhadap media dengan menerapkan berbagai kebijakan yang bersifat represif, yang saat ini kita kenal dengan *Censorship* (Muhammad, 2014). Pemerintah Cina mulai secara intens menerapkan kebijakan sensor sejak tahun 2000-an. Kebijakan yang diterapkan menggunakan beberapa mekanisme diantaranya menggunakan sistem hukum, teknologi dan juga pengawasan manusia yang secara kompleks ditujukan untuk mengontrol konten web yang tersedia di Cina. Diantaranya yaitu

pembuatan peraturan yang mengikat para pengguna internet Cina, teknologi pembatasan internet yang dikenal dengan *Great Firewall of China*, pemberian tanggung jawab mengenai sensor kepada lembaga-lembaga pemerintah, dan aktivitas sensor yang melibatkan masyarakat.

Dalam perjalanannya, aktivitas *censorship* yang diterapkan di Cina ini seringkali disinggung dengan isu pelanggaran HAM karena dalam pelaksanaannya telah melanggar beberapa pasal dalam Deklarasi Universal HAM PBB 1948 diantaranya pasal 12 dan 19, yang sempat menyinggung hak kebebasan individu dalam memperoleh kebebasan berekspresi. Seperti yang terjadi pada seorang penulis dan juga blogger terkenal di Cina yang bernama Han-han. Tulisan-tulisannya seringkali disensor oleh pemerintah. bahkan kini namanya masuk dalam list kata-kata yang disensor di Cina. Dalam kasus lain, terjadi pada Shi Tao yang merupakan activist Tiananment. Ia ditangkap dan dipenjara hanya karena memposting informasi seputar beberapa hal yang tidak boleh dilakukan sehubungan dengan peristiwa Tiananment (Ritzen, *Meet the activists fighting the Great Chinese Firewall*, 2018).

Kasus ini menjadi semakin menarik ketika penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh pemerintah Cina yang berkaitan dengan HAM ini justru memunculkan perlawanan dari aktor domestik Cina itu sendiri. Aksi perlawanan itu datang dari individu maupun kelompok. Kompleksitas permasalahan *censorship* yang terjadi di Cina telah menarik perhatian individu bahkan kelompok tersebut untuk kemudian menyusun berbagai strategi perlawanan terhadap *censorship* di Cina. Bentuk perlawanan yang dilakukan dapat berupa protes secara online, pembentukan alat-alat pengelak sensor untuk menerobos *The Great Firewall of China*, pendokumentasian konten-konten yang disensor melalui layanan cermin, dan beberapa lainnya. Salah satu organisasi di Cina yang dibentuk untuk melawan sensor adalah *greatfire*. Organisasi

ini dibentuk untuk mengkampanyekan hak berekspresi masyarakat Cina dengan menciptakan perangkat lunak dan website yang bernama *greatfire.org*.

Perlawanan lainnya datang dari individu yang beramai-ramai melakukan protes atas peraturan sensor keras pemerintah Cina yang dipicu oleh campur tangan otoritas propaganda dengan editorial surat kabar. Protes dilakukan di depan kantor *Southern Newspaper* (Kaiman, 2013). Bentuk-bentuk perlawanan yang dilakukan oleh aktor-aktor tersebut kemudian membuat mereka terjaring dalam sebuah jaringan yang disebut *anti-censorship movement*.

Dalam aksi perlawanannya, *anti-censorship movement* difasilitasi oleh media, baik itu website, platform, dan juga media pemberitaan domestik maupun internasional. Selain media, mereka juga menggunakan teknologi canggih yang digunakan untuk menerobos sensor. Media dan juga teknologi canggih tersebut mereka jadikan perpanjangan tangan dari misi yang dibawa untuk menarik aktor-aktor internasional. Hal ini dilakukan *anti-censorship movement* juga dikarenakan tertutupnya akses mereka terhadap pemerintah. Sehingga *anti-censorship movement* memutuskan untuk membangun jaringan transnasional dalam memperjuangkan isu yang dibawa. Dalam perjuangannya *anti-censorship movement* mencoba melakukan beberapa strategi diantaranya politik informasi, politik simbol, politik pengaruh, dan politik akuntabilitas.

Oleh karena itu, tulisan ini penulis akan membahas lebih dalam mengenai strategi perjuangan *anti-censorship movement* dalam menyikapi kebijakan *censorship* di Cina menggunakan bantuan jaringan advokasi transnasional.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana strategi *anti-censorship movement* menyikapi kebijakan *censorship* di Cina dengan bantuan jaringan advokasi transnasional ?

1.3 Tujuan Penelitian

Riset ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengidentifikasi perkembangan *ensorship* sebagai strategi penyaringan media di Cina
2. Untuk mengetahui strategi *anti-censorship movement* dalam menyikapi kebijakan *ensorship* di Cina

1.4 Signifikansi Penelitian

Penelitian ini dianggap penting mengingat kebijakan *ensorship* di Cina kemudian mengakibatkan banyak pelanggaran HAM, termasuk diantaranya menghambat hak berekspresi dan hak privasi masyarakat serta menimbulkan aksi represif dari pemerintah, berupa penyiksaan bahkan pembunuhan. Penelitian ini kemudian semakin menarik untuk dibahas mengingat Cina merupakan negara komunis totalitarian, dimana suara individu dan kelompok seringkali tidak diindahkan oleh pemerintah, sehingga semakin menarik untuk diketahui bagaimana kemudian *anti-censorship movement* menyusun strategi untuk menyikapi kebijakan *ensorship* di Cina.

Telah banyak penelitian mengenai *ensorship* di Cina, namun dalam tulisan ini penulis mengambil sudut yang berbeda dari lainnya yaitu melihat strategi *anti-censorship movement* dengan menggunakan konsep Transnational Advocacy Network (TAN). Untuk itu, tulisan ini akan mengkaji lebih dalam mengenai strategi *anti-censorship movement* dengan menggunakan bantuan jaringan advokasi transnasional .

1.5 Cakupan Penelitian

Cakupan penelitian yang digunakan penulis terkait dengan topik diatas adalah mengenai kebijakan *ensorship* yang diterapkan pemerintah Cina, pelanggaran *ensorship* dalam konteks HAM, dan strategi politik *anti-censorship movement* menyikapi isu tersebut pada tahun 2000 hingga 2013. Penulis akan menganalisis strategi apa saja yang digunakan oleh *anti-censorship movement* yang dalam kasus ini merupakan jaringan advokasi transnasional untuk akhirnya dapat menyikapi kebijakan *ensorship* di Cina. Penulis akan mengambil hasil implementasi kebijakan *ensorship* terhadap masyarakat domestik Cina, mengaitkan perubahan keadaan yang terjadi di masyarakat, sehingga dapat dilihat adanya pembentukan perilaku atau dorongan yang membentuk sebuah gerakan *anti-censorship movement* yang akan menyusun strategi-strategi untuk menyikapi kebijakan *ensorship* di Cina .

1.6 Tinjauan Pustaka

Pembahasan mengenai konsep Transnational Advocacy Network dapat dijelaskan oleh tulisan Margaret Keck dan Kathryn Sikkink. Dalam tulisannya ia mengatakan bahwa sebuah jaringan dapat terbentuk karena bantuan dari teknologi komunikasi dan juga peningkatan forum-forum HAM, keyakinan terhadap efektifitas jaringan transnasional sebagai senjata dalam memperjuangkan isu, serta sikap pemerintah yang tidak memperdulikan suara masyarakatnya. Jaringan tersebut dilihat sebagai organisasi yang fleksibel namun terikat pada nilai yang sama, dengan informasi sebagai kekuatan yang utama. Penulis melihat bahwa jaringan transnasional tersebut merupakan sebuah organisasi yang melakukan komunikasi dan pertukaran informasi secara suka rela, timbal balik, dan

horizontal. Menurut penulis juga, keberhasilan jaringan tersebut dalam mengubah politik domestik suatu negara dipengaruhi oleh karakteristik target, isu, dan juga kekuatan jaringan transnasional tersebut. Taktik yang digunakan jaringan ialah; *information politic*, *symbolic politic*, *leverage politic*, *accountability politic*. Aktor-aktor yang dapat tergabung dalam jaringan diantaranya; organisasi non pemerintah lokal dan internasional, organisasi advokasi dan penelitian, pergerakan sosial lokal, lembaga, media, gereja, persatuan dagang, organisasi konsumen, intelektual, bagian dari organisasi regional dan internasional, parlemen dan/atau eksekutif pemerintah (Sikkink M. E., 1999).

Tulisan Margaret Keck dan Kathryn Sikkink ini berkontribusi dalam menjelaskan peran sebuah jaringan advokasi transnasional bagi suatu pergerakan sosial. Di tulisan ini menjelaskan mulai dari alasan, proses, hingga terbentuknya jaringan advokasi transnasional dalam memperjuangkan isu yang sedang dibawa. Dijelaskan pula di dalam tulisan bahwa jaringan advokasi transnasional tersebut terbentuk karna aspirasi aktor domestik yang terhambat, sehingga aktor domestik tersebut mencari solusi ke luar domestiknya yaitu dengan jalan berjejaring.

Lalu pembahasan mengenai strategi sensor media Cina dapat ditemui didalam tulisan Beina Xu dan Eleanor Albert. Dalam tulisannya, penulis menyinggung bahwa program sensor yang diterapkan pemerintah tidak hanya berfungsi sebagai sensor terhadap media namun secara tidak langsung menjadi pendorong bagi wartawan dan pengguna internet lainnya untuk menekan dirinya sendiri agar lebih selektif dalam membuat berita. Karena dalam perjalannya banyak wartawan yang menjadi korban pemecatan dan demosi, mendapat hukuman pencemaran nama baik, denda, penangkapan, dan pemaksaan pengakuan kesalahan di media televisi. Di dalam tulisannya juga disampaikan bahwa sensor telah

menarik banyak kecaman dari para pegiat kebebasan pers. Yang mana disebabkan oleh tindakan represif pemerintah terhadap aktivis-aktivis yang memperjuangkan HAM dan demokrasi serta mengungkap korupsi pejabat pemerintah (Beina Xu, 2017). Ada banyak kasus yang diceritakan oleh penulis di dalam tulisan tersebut, dan itu dapat menjelaskan bagaimana kemudian aktivitas sensor telah membawa pemerintah kepada bentuk pelanggaran HAM dan juga tindakan represif yang terjadi oleh sejumlah masyarakatnya.

Lalu pembahasan mengenai *ensorship* di Cina dapat kita temukan lagi di sebuah jurnal yang ditulis oleh Gary King, Jennifer Pan dan Margaret E. Roberts. Tulisan ini merupakan hasil dari analisis penulis mengenai strategi *ensorship* yang diterapkan oleh Cina. Disaat yang bersamaan, penulis juga meneliti mengenai motif pemerintah Cina melakukan sensor. Dalam penelitiannya, mereka dibantu oleh tenaga komputer yang menjadi teknologi praktis dan canggih di era modern. Hasil dari analisis menunjukkan bahwa motif dasar pemerintah Cina melaksanakan program sensor adalah untuk mengurangi aksi-aksi kolektif yang berpotensi mengganggu stabilitas domestiknya. Dalam tulis ini juga, disebutkan bahwa Cina tidak hanya menerapkan censor dari pusat, tetapi juga memberikan tanggung jawab *ensorship* ini kepada para penyedia konten internet, yang setiap dari mereka harus bertanggung jawab secara pribadi memperkerjakan para penyensor lainnya (Gary King J. P., 2013). Dari tulisan Gary King, Jennifer Pan dan Margaret E. Roberts, setidaknya dapat kita ketahui bagaimana sistem sensor dijalankan oleh pemerintah Cina yang ternyata tidak hanya melibatkan teknologi, namun juga melibatkan masyarakatnya untuk berpartisipasi mengendalikan arus informasi yang terjadi di Cina.

Selain itu, dalam tulisannya Susan L Shirk juga dijelaskan bahwa dalam rangka mendorong kegiatan sensor dan mengurangi aksi kolektif yang berpotensi terhadap

runtuhnya stabilitas domestik negara, pemerintah Cina cukup intens dalam memberdayakan televisi sebagai alat propaganda yang akan mempublikasikan dan menyebarkan informasi-informasi baik mengenai pemerintahan. Meskipun pada saat ini kebanyakan dari kita mencari segala informasi di media sosial, namun di Cina televisi masih menjadi favorit masyarakatnya untuk mencari sebuah informasi terbaru ataupun hiburan. Kebanyakan dari mereka yang menonton televisi adalah mereka yang berasal dari keluarga dengan edukasi dan tingkat ekonomi yang rendah. Sehingga penting bagi pemerintah Cina untuk selalu menjaga masyarakat kelas bawah agar tetap satu pemikiran dengan pemerintah dan tidak mudah terpecah belah karena pengaruh dari konten sensitif yang akan disiarkan di televisi (Shirk, 2011). Dari sini dapat dilihat bahwa pemerintah Cina sangat sensitif dengan kemungkinan akan munculnya tindakan kolektif yang suatu waktu dapat terjadi dan akan menimbulkan permasalahan yang besar. Untuk itu, pemerintah Cina tetap mengontrol pesan dan propaganda tidak hanya melalui media-media modern masa kini, namun juga melalui mengontrol perusahaan penyiaran televisi untuk memastikan mereka mengikuti perintah propaganda Cina

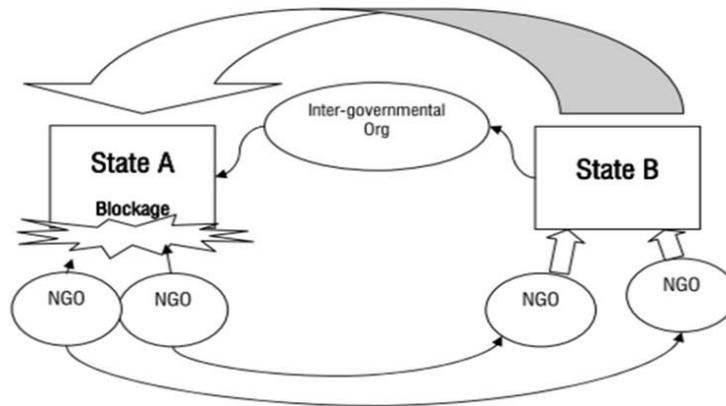
Menindaklanjuti perkembangan program sensorship di Cina, sebuah tulisan yang ditulis oleh Muhammd Yurizal berpandangan bahwa *sensorship* di Cina justru memberikan perkembangan bagi produk IT lokal Cina . Pemblokiran situs-situs media dari barat seperti *google, facebook, twitter*, dan lainnya ternyata membuat produk media local Cina mulai menguasai pasar internet dunia. Dalam memberikan alternatif kepada masyarakatnya atas situs-situs yang telah diblokir, Cina menyediakan situs-situs lain yang memiliki fungsi yang mirip dengan situs tersebut, seperti Baidu, Wechat, weibo dan lainnya. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil lembaga riset analisis internasional yang menunjukkan bahwa pengguna

internet di Cina semakin meningkat hingga 749 juta orang pada tahun 2014 yang menghasilkan pemasukan ke pasar internet yang awalnya 150 miliar yuan menjadi 300 miliar yuan sekitar Rp 534 triliun (Muhammad, 2014). Tulisan ini dapat memberikan pandangan lain terhadap motif pemerintah Cina menerapkan sensor, yaitu untuk kepentingan perekonomian domestik Cina itu sendiri.

1.7 Landasan Konsep/Teori/Model

Dalam menganalisis permasalahan penelitian, penulis menggunakan konsep *Transnational Advocacy Network (TAN)* by Margareth Keck dan Kathryn Sikkink. Menurut Keck dan Sikkink konsep ini terbentuk karena adanya pemikiran yang sama baik itu mengenai ide-ide, norma, kebijakan, yang dalam pengaplikasiannya sering kali melibatkan individu untuk masuk dan turut andil dalam upaya mengadvokasi kebijakan. Jaringan ini dianggap menarik karena tidak mengandalkan kekuatan militer maupun ekonomi, melainkan memiliki cara sendiri dalam melakukan advokasi (Dewanto, 2017). Situasi ini hampir sama seperti yang dilakukan oleh *anti-censorship movement* Cina dalam menyuarakan isu yang mereka bawa. Penerapan kebijakan *censorship* di Cina telah dianggap mengekang Hak Asasi individu dalam hal berekspresi. Hal ini yang kemudian memicu *anti-censorship movement* membuat jaringan advokasi untuk menghadapi sensor pemerintah Cina.

Konsep *Transnational Advocacy Network* melihat bahwa ada beberapa aktor utama yang mampu memberikan kontribusi, yaitu *Non-Governmental Organizations (NGO)* baik berskala nasional maupun internasional, *Inter-Governmental Organizations (IGO)*, lalu gerakan sosial lokal, media, organisasi keagamaan, aktor dalam perdagangan dan para peneliti, serta badan eksekutif maupun parlemen dari suatu pemerintahan. (Dewanto, 2017)



Sumber: Keck & Sikkink, *Activists Beyond Border: Advocacy Networks in International Politics* (1998), hal. 13

Dalam perjalanannya TAN terbentuk karena aspirasi dari aktor-aktor domestik terhambat. Untuk itu, kemudian mereka berinisiatif untuk mencari dukungan dari luar domestik dan memperjuangkan isu yang mereka bawa untuk mempengaruhi pemerintah di negaranya. Dalam pengaplikasiannya, TAN menggunakan empat strategi, yaitu; *Information Politics, Symbolic politics, leverage politics, dan Accountability Politics*. (Dewanto, 2017)

Information Politics, strategi ini merupakan salah satu diantara keempat strategi TAN yang memiliki kemampuan tercepat dalam mengembangkan informasi dan mengarahkan informasi tersebut kearah yang memiliki pengaruh yang besar.

Symbolic politics, dalam strategi ini akan banyak simbol-simbol, tindakan-tindakan, cerita ataupun kisah yang dapat mewakili isu-isu yang sedang diangkat sehingga mudah dibawa ke masyarakat luas.

Leverage Politics, aktor-aktor yang melakukan strategi ini akan lebih fokus untuk mencari dan mengumpulkan aktor yang dianggap memiliki kekuatan untuk mempengaruhi masyarakat luas sehingga dapat memperkuat jaringan tersebut.

Dan yang terakhir adalah strategi *Accountability Politics* yang dalam hal ini aktor-aktor dari jaringan tersebut dapat menjaga dan mengawasi pemerintah agar tidak menyeleweng atau tetap kokoh pada kebijakan yang telah disepakati bersama.

Strategi diatas digunakan penulis untuk menganalisis strategi aktor-aktor domestik Cina dalam menekan kebijakan *censorship* di Cina . Dalam hal ini mereka merasa bahwa hak-haknya telah direnggut dengan keberadaan kebijakan *censorship* di Cina .

1.8 Metode Penelitian

A. Jenis Penelitian

Dalam rangka menjawab riset ini, penulis menggunakan metode pendekatan kualitatif. Metode ini lebih bersifat deskriptif, yang dalam usaha pengumpulan data untuk menjawab penelitian, penulis bisa menggunakan metode seperti wawancara, pengamatan, penelitian pustaka. (Wahidmurni, 2017) Dan dalam pengumpulan data penelitian kali ini, penulis menggunakan teknik penelitian pustaka. Penulis akan mencari dan mempelajari berbagai data-data dari sumber-sumber terpercaya seperti buku, dokumen, jurnal, berita, hingga laporan yang memiliki keterkaitan dengan rumusan masalah yang dibahas dalam tulisan ini.

B. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Maksud dari subjek penelitian disini adalah orang, tempat ataupun benda yang diamati dalam penelitian. Dalam penelitian kali ini, subjek yang diamati adalah masyarakat Cina khususnya aktivis *anti-censorship* .

2. Objek Penelitian

Maksud dari objek penelitian disini adalah yang menjadi sasaran dalam penelitian. Dalam hal ini sasaran dapat berupa benda atau pokok persoalan yang hendak diteliti. Objek yang akan diteliti dalam penelitian kali ini adalah kebijakan sensor Cina dan strategi *anti-censorship* menyikapi kebijakan sensor di Cina .

C. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian kali ini, penulis mengambil data dari dua sumber yaitu sumber primer dan sekunder. Sumber primer tersebut merupakan sumber yang dikeluarkan pemerintah atau instansi terkait dari negara Cina yang dalam hal ini bisa menjawab rumusan masalah. Sedangkan data sekunder merupakan data yang berasal dari berbagai jurnal, berita, maupun data-data yang telah diteliti oleh berbagai pihak yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan penelitian.

D. Proses Pengumpulan Data

Dalam proses penelitian ini, akan dimulai dengan melakukan pra riset hingga laporan penelitian. Prosedur ini dibuat untuk menjadi panduan bagi peneliti dalam rangka menentukan arah saat melakukan riset. Adapun prosedur yang digunakan adalah sebagai berikut;

1. Pra Riset

Dalam tahap pra riset ini, peneliti akan melakukan persiapan riset yaitu mencari dan melihat sumber-sumber yang memiliki keterkaitan dengan penelitian, kemudian mulai membaca dan mengelompokkan sesuai dengan kebutuhan penelitian.

2. Pengambilan Data

Dalam riset ini, peneliti akan mendapatkan data dari sumber sekunder yang mencakup: majalah berkala, buku teks akademis, pernyataan resmi pemerintah dan publikasi, surat kabar harian, dan jurnal. Pemilihan sumber sekunder didasarkan pada reputasi kredibilitas media / penerbit dan hubungannya dengan topik riset.

3. Analisis Data

Setelah dua tahap diatas, tahap penting selanjutnya adalah menganalisis data. Langkah-langkah data diambil dari analisis data dalam rancangan riset kualitatif . langkah-langkah yang harus dilakukan dalam tahap ini adalah:

a. Mengorganisir dan menyiapkan data

Langkah pertama ini berfokus pada mengumpulkan data yang dikumpulkan dari semua sumber.

b. Membaca semua data

Dalam rangka memahami data yang telah dikategorikan, semua data perlu dibaca secara menyeluruh.

c. Pengkodean

Dalam proses ini, peneliti harus melakukan upaya pelabelan data tertentu dalam riset. Kisaran kode dapat dikembangkan selama proses analisis.

d. Mengaitkan dengan tema

Proses ini bertujuan untuk penggambaran kategori dengan tema. Di fase ini yang nantinya akan ditemukan terkait tema dan kategori.

e. Interpretasi

Tahap terakhir dalam menganalisis data yang telah dikumpulkan adalah untuk menjelaskan maksud data baik hasil wawancara maupun dokumen terkait.



BAB II

SENSOR DI CINA, PENYIMPANGAN SENSOR DALAM KONTEKS HAM DAN KEMUNCULAN ANTI-CENSORSHIP MOVEMENT

2.1 Penerapan dan Perkembangan Sensor di Cina

Cina merupakan negara dengan sistem sensor terbaik di dunia. Secara khusus, kecanggihan teknologi yang digunakan Cina untuk mengontrol informasi yang terjadi di Cina belum ada yang bisa mengunggulinya. Sensor sendiri didefinisikan oleh Billiani merupakan bentuk penulisan ulang wacana manipulatif oleh suatu agen, baik agen terstruktur maupun tidak terstruktur dengan tujuan untuk menyaring aliran informasi dari satu sumber ke sumber lain (Tan, 2014). Seperti yang dilakukan pemerintahan Cina yang dalam hal ini merupakan agen terstruktur. Dalam rangka menyaring aliran informasi yang terjadi di Cina, Pemerintah Cina membentuk berbagai macam kebijakan terkait sensor. Kebijakan yang diterapkan menggunakan beberapa mekanisme diantaranya menggunakan sistem hukum, teknologi dan juga pengawasan manusia yang secara kompleks ditujukan untuk mengontrol konten web yang tersedia di Cina.

Penerapan censorship ini dilatarbelakangi oleh adanya reformasi ekonomi di Cina tahun 1987. Koneksi internet mulai masuk dan mulai mengembangkan ilmu pengetahuan dan juga ekonomi di Cina. Tahun 1980 dapat disaksikan adanya peningkatan desentralisasi ekonomi dari sistem perencanaan pusat menuju lokal. Ketika pemerintah mulai mendesentralisasikan kontrolnya, ketika itu pula mereka mulai bergantung pada media sebagai sarana untuk memastikan pejabat lokal bekerja sesuai dengan kepentingan partai (Roberts, Censored; Distraction and Diversion Inside China's Great Firewall, 2017). Kebijakan media ini menuai perdebatan antara dua kelompok pejabat tinggi pemerintah.

Deng Hu Yaobang selaku sekretaris jendral dan Zao Ziyang sangat mendukung kebebasan pers, sementara anggota konservatif seperti Deng Liqun menganggap hal tersebut tetap harus berada dibawah kendali pemerintah. Tahun 1982, konstitusi Cina mulai menjamin kebebasan berbicara dan berekspresi untuk semua warga negara Cina, termasuk didalamnya kebebasan pers dan demonstrasi (Roberts, Censored; Distraction and Diversion Inside China's Great Firewall, 2017).

Pada April 1989, protes pro-demokrasi dilakukan oleh mahasiswa, berpusat di Lapangan Tiananmen dan tersebar di seluruh Cina. Protes ini dipicu oleh kematian Hu Yaobang, yang merupakan tokoh reformis yang menjabat sebagai sekretaris Jendral Partai Komunis. Protes tersebut semakin membesar pada 4 Juni 1989, berakibat pada tindak kekerasan terhadap para pelaku protes dan juga krisis internal Cina (Roberts, Censored; Distraction and Diversion Inside China's Great Firewall, 2017). Setelah peristiwa itu terjadi, kebebasan dan media dianggap sebagai salah satu pemicu pecahnya peristiwa bersejarah protes Tiananmen di Cina. Berkaca dari peristiwa tersebut, kebijakan domestik Cina yang melonggarkan kontrol media informasi dan komunikasi dirasa menjadi sebuah ancaman besar bagi Cina. Sehingga mulai bermunculan usaha-usaha pembatasan terhadap aktivitas media.

Tahun 1995, web mulai masuk ke Cina, pemerintah mulai kebingungan untuk memikirkan bagaimana cara mengoperasikan *gatekeeper of information* dalam mengendalikan arus informasi yang begitu deras. Awalnya *gatekeeper of information* menjadi saluran informasi yang ditransisikan dari “one to many” model, yang berarti beberapa perusahaan media mentransfer informasi untuk banyak orang. Sedangkan perkembangan teknologi berubah menjadi “many to many” model, yang mana setiap harinya individu dapat

berkontribusi ke media online serta dengan mudah berbagi berita dan pendapat satu sama lain (Roberts, Censored; Distraction and Diversion Inside China's Great Firewall, 2017). Bersamaan dengan hadirnya internet di Cina, pemerintah mulai mengembangkan hukum dan teknologi yang memungkinkan Cina lebih mengontrol informasi online, termasuk penyaringan, pendaftaran situs web online, dan pengawasan internet oleh pemerintah.

Pada bulan September tahun 2000, Perintah Dewan Negara No. 292 membuat rangkaian pertama pembatasan konten untuk para penyedia konten internet. Perintah tersebut berisikan “Tindakan tentang Layanan Informasi Internet”, dan “Keputusan Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional tentang menjaga keamanan jaringan computer.” Secara keseluruhan, peraturan ini mencegah pengguna internet dan ISP untuk tidak menampilkan konten apapun yang tidak disetujui oleh pemerintah. Termasuk didalamnya adalah konten-konten yang dianggap membocorkan rahasia negara, merongrong pemerintah, menentang kebijakan negara tentang agama, mendukung sekte dan takhayul feodal, mengganggu ketertiban sosial, atau menunjukkan kecabulan, pornografi, perjudian, atau kekerasan (Stevenson, Breaching the Great Firewall: China’s Internet Censorship and the Quest for Freedom of Expression in a Connected World, 2007). Semua layanan informasi harus memiliki lisensi (jika komersial) dan terdaftar pada pihak berwenang (jika pribadi). Situs Web Cina tidak dapat lagi terhubung ke situs web berita luar negeri ataupun mendistribusikan berita dari media luar negeri tanpa persetujuan terpisah. Hanya penerbit yang berlisensi yang dapat melakukan hal tersebut. Di pasal 11 aturan ini disebutkan bahwa “penyedia konten internet bertanggung jawab atas legalitas informasi yang disebarluaskan melalui layanan mereka (China C. E., 2004)”.

Kebijakan ini kemudian didukung dengan pemberian tanggung jawab atas kontrol informasi melalui Departemen Propaganda PKC, selanjutnya disebut dengan CCPPD (*Chinese Communist Party Propaganda Department*). CCPPD merupakan lembaga utama yang memantau dan menyusun strategi konten yang akan disensor. Lalu mengatur jenis konten yang harus disebarluaskan ke semua media informasi di Cina, termasuk internet, ponsel, publikasi cetak, radio, konten televisi, seni, dan juga pendidikan yang digunakan di sekolah atau pelatihan kejurusan. CCPPD pula yang memberikan arahan kepada *gatekeeper of information* di media-media baik dari produsen TV hingga para konten internet, untuk bertanggung jawab atas nilai dari konten yang mereka buat, juga sebagai penyensor atau penyebar jenis informasi yang sesuai dengan standar pemerintah (Roberts, Censored; Distraction and Diversion Inside China's Great Firewall, 2017). CCPPD merupakan pusat dari kontrol informasi di Cina namun juga mendelegasikan perannya ke lembaga yang lebih kecil disetiap daerah untuk melaksanakan *censorship* dan propaganda di berbagai media Cina.

Disamping CCPPD, PKC juga memiliki lembaga peradilan para pelanggar UU informasi, yaitu *The Ministry of State Security* bertanggung jawab atas pengumpulan intelejen yang mencakup pengawasan internet untuk menegakkan UU kontrol informasi (Roberts, Censored; Distraction and Diversion Inside China's Great Firewall, 2017). Dalam perjalanannya, taktik mengatur konten internet telah bergeser kearah yang lebih legalistik dan tanpa kompromi. Para pelanggar UU Informasi akan langsung di proses atau ditangani oleh *The Ministry of State Security*.

Selanjutnya, pada Maret 2002 pemerintah Cina meluncurkan “Ikrar ke publik mengenai *Self-Regulation and Professional Ethick* untuk industry internet Cina”, sebagai

sistem yang dapat digunakan untuk warga melaporkan situs yang berisi informasi ilegal. Ikrar ini juga mewajibkan perusahaan internet untuk memantau informasi yang diterbitkan oleh pengguna, menahan diri dari memuat informasi yang terlarang, menghapus informasi berbahaya, dan juga menahan diri untuk membuat tautan yang berisi informasi berbahaya (Ben Wagner, 2015).

Selain dari sistem regulasi yang telah diterapkan, Cina juga memperluas aksinya dengan menggunakan sistem kontrol secara teknologi dengan cara memblokir beberapa situs luar negeri Cina. Langkah ini diambil oleh pemerintah Cina karena mereka tidak memiliki yuridiksi secara langsung untuk mengontrol media asing. Dalam sebuah literature, dinyatakan bahwa Cina telah berhasil membangun dinding yang dijadikan sebagai pembatas internet yang dikenal dengan “ *The GreatFire Wall of China*”. Proyek ini sudah mulai digarap di tahun 1998 dan mulai aktif melakukan pembatasan dan sensor di Cina pada tahun 2003 dan masih beroperasi hingga saat ini. Teknologi ini merupakan sistem pengawasan berbasis database yang dapat mengakses catatan setiap warga negara dengan organisasi keamanan Cina (News, 2018). Dalam praktiknya, The Great Firewall membagi web yang akan diblokir menjadi delapan kategori, yaitu: media platform asing (*facebook.com, youtube.com, twitter.com, blogspot.com, wordpress.com*), media berita asing (*nytimes.com, Bloomberg.com, rfa.org*), situs berbagi informasi (*thepiratebay.se, slideshare.net*), situs portal Cina dan forum diskusi luar negeri (*6park.com, wenxuecity.com, discuss.com, beijingspring.com, www.amnesty.org*), alat pengelak sensor (*anonymouse.org, torproject.org, openvpn.net*), situs Falun Gong (*epochtimes.com, aboluowang.com, www.ntdtv.com*, dll) dan situs pornografi dan game (Shen, 2015).

Beberapa ahli lain mengatakan bahwa kebijakan tersebut juga dilakukan karena faktor ekonomi. Dimana Cina telah membuat situs resmi domestiknya yang memiliki fungsi mirip dengan situs asing yang diblokir, seperti Baidu yang berfungsi seperti Google, Weibo seperti Whatsapp, Taobao seperti media belanja, dan Youku seperti Youtube. Sebagai media domestik Cina, situs-situs tersebut akan memberikan kemudahan terhadap Pemerintah Cina dalam mencapai national interest sekaligus juga meningkatkan pendapatan domestiknya (Wu, 2019). Jadi selain untuk menjaga stabilitas keamanan nasional Cina, langkah tersebut dilakukan juga untuk meningkatkan kepentingan nasionalnya dalam bidang ekonomi.

Teknik sensor di Cina tidak hanya melibatkan sistem hukum dan juga teknologi, namun juga masyarakat Cina itu sendiri. Hal ini nampak pada proses penyaringan kata kunci dan topik pembahasan. Aktivitas peninjauan dan penyaringan konten dilakukan oleh jutaan penyensor. Setidaknya ada 2 juta penyensor yang dipekerjakan pemerintah untuk mengendalikan internet (BBC, 2013). Perangkat ini akan melacak seberapa luas suatu topik yang sedang dibahas dengan menghitung jumlah komentar. Ketika skor mencapai target yang telah diatur, sistem akan mengirimkan peringatan (Xu, 2013). Sebagian penyensor berasal dari orang pemerintahan, dan sebagian lainnya berasal dari perusahaan swasta, yang mana mereka wajib memperkerjakan para penyensor sebagai bagian dari pembangunan diri mereka dalam pasar Cina. Berdasarkan kuantitasnya, setiap website memperkerjakan lebih dari 1000 penyensor untuk melaksanakan mandate dari partai untuk menyensor konten-konten yang dilarang dan dicurigai. Pihak Sina Weibo mengatakan bahwa mereka memperkerjakan 1000 orang untuk memonitor dan menyensor jaringan sosial mereka. Pada bulan Mei 2012, Sina membuat sistem yang mana setiap akun diberikan jumlah poin yang otomatis akan berkurang ketika akun tersebut memposting konten berbahaya. Ketika poin

mencapai angka nol, akun akan otomatis diblokir oleh pihak Sina (Thomas Lum P. M., 2012).

Metode ini dapat terlihat pada peristiwa besar Cina yaitu Protes Tiananmen, terutama ketika mendekati perayaan hari bersejarahnya. Dilansir dari laman CNN Indonesia dikatakan bahwa pemerintah Cina telah menyensor seluruh kata-kata yang berkaitan dengan peristiwa Tiananment. Unggahan terkait peristiwa tersebut hampir tidak ditemui di media sosial. Selain di dunia maya, pemerintah juga menghapus jejak kelim peristiwa Tiananment dari buku-buku sejarah Cina. Hal ini dilakukan dalam rangka menutupi kesalahan lama pemerintah (CNN, 2019). Selain itu, semua postingan yang membahas masalah-masalah sensitif pemerintah seperti korupsi lokal, degradasi lingkungan, keamanan pangan, pelecehan seksual, dan kompensasi pekerja akan otomatis disensor.

Di tahun 2004, pemerintah membuat pedoman terkait sensor internet yang meminta universitas-universitas untuk merekrut komentator online yang dapat memandu diskusi online kearah yang dapat di terima secara politik (Guardian, 2018). Pasukan komentator online bayaran tersebut dikenal dengan "*Fifty Cent Party*", merupakan pasukan komentator yang dibayar 50 cent perkomentar oleh pemerintah, untuk mempengaruhi opini publik dengan cara memberikan komentar-komentar positif mengenai pemerintah. Pemerintah mengerahkan ribuan komentator dan membina para blogger untuk menangkal komentar negatif dengan pesan positif yang persuasif. Setiap tahunnya, pemerintah memposting sekitar 448 juta postingan palsu dengan bantuan komentator tersebut (Gary King J. P., 2017). Beberapa pengamat mengatakan bahwa selain komentar positif mengenai pemerintah, mereka terkadang juga diperintahkan untuk memfitnah aktivis yang mengkritik pemerintah (Roberts, Censored; Distraction and Diversion Inside China's Great Firewall, 2017). Dengan

kata lain, kelompok ini ditugaskan untuk melayangkan propaganda pada pemikiran masyarakat Cina dan memfitnah para penentang pemerintah. meskipun pemerintah berusaha membatasi akses individu terhadap arus informasi, banyak warga Cina yang berhasil membuta terobosan signifikan ke dunia politik negara tersebut.

Lalu pada tahun 2005, rangkaian peraturan diatas semakin dikembangkan dengan memperluas makna dari istilah “berita internet”. Istilah tersebut didefinisikan secara luas sebagai “topik terkini dan politik”, yang mencakup laporan dan komentar tentang urusan sosial kemasyarakatan seperti yang berkaitan dengan politik, ekonomi, urusan militer dan diplomatik serta peristiwa di masyarakat yang terjadi secara tiba-tiba. Peraturan ini berlaku bagi siapa saja yang menerbitkan informasi berita di situs web, menyediakan layanan sistem papan bulletin mengenai berita terkini, atau mengirimkan informasi tentang berita-berita terkini kepada publik (Stevenson, Breaching the Great Firewall: China’s Internet Censorship and the Quest for Freedom of Expression in a Connected World, 2007). Undang-undang baru ini berisi mengenai semua pembatasan konten dan penyimpanan informasi yang ada di undang-undang sebelumnya, namun tambahan berita tentang “topik terkini dan politik” yang akan di posting harus merupakan informasi yang dirilis oleh kantor berita resmi pemerintah. Perluasan definisi ini diyakini sebagai cara pemerintah dapat dengan mudah tidak menyetujui informasi yang diposting oleh para blogger.

Terlepas dari berbagai strategi sensor yang telah dipaparkan diatas, keberhasilan Cina dalam mempertahankan kendali atas sensor tidak lepas dari bantuan beberapa perusahaan swasta asing. Karena untuk dapat beroperasi di Cina, perusahaan internet di dalam maupun luar negeri harus menandatangani “ Janji Publik tentang Disiplin Diri untuk Industri Internet Cina”. (Watch, refworld: Race to the Bottom: Corporate Complicity in Chinese Internet

Censorship, 2006). Pedoman dan aturan tersebut memastikan bahwa perusahaan teknologi asing yang beroperasi di Cina harus mengikuti aturan internet Cina. Beberapa perusahaan dan aliansi asing yang membantu penyensoran dan pengendalian arus informasi di Cina yaitu; Microsoft, CISCO, dan Yahoo. Perusahaan asing tersebut telah dilaporkan terlibat dalam peningkatan infrastruktur, penyaringan dan pengawasan internet di Cina.

Yahoo dilaporkan telah menyerahkan informasi akun email penggunanya kepada pihak pemerintah Cina hingga menyebabkan empat penggunanya ditahan. Dalam kasus lain, Yahoo menyediakan informasi mengenai identitas seorang jurnalis Cina sehingga ia harus merasakan 10 tahun hukuman penjara. Pada Juni 2006, Microsoft mendapat kecaman dari pers dan blogger karena menyensor kata-kata demokrasi dan kebebasan dari MSN Space. Selain itu, Microsoft juga menutup situs MSN Space seorang jurnalis Cina Zhao Jing. Dalam membantu melancarkan sensor di Cina, beberapa laporan menyatakan bahwa Cisco ternyata telah terlibat dalam meningkatkan infrastruktur, pemfilteran, dan pengawasan internet di Cina. Cisco juga telah menjual beberapa ribu router ke Cina. Pada Januari 2006, Google meluncurkan mesin pencarian yang disensor yaitu Google.cn (Thomas Lum P. M., 2012). Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah Cina telah berhasil mempengaruhi perusahaan yang terlibat dengan negaranya untuk turut bertindak sebagai penyensor.

Tahun 2011, Kantor Informasi Dewan Negara mengumumkan pemindahan kantornya yang mengatur internet ke lembaga baru yang akan diberi tanggung jawab untuk mengatur internet di Cina. Hubungan lembaga baru tersebut dengan lembaga regulasi lainnya tidak dijelaskan secara detail oleh pemerintah (Wines, 2011). Tahun 2013, Presiden Xi mengganti Kantor Informasi Negara itu dengan *The Cyberspace Administration of China* (CAC). CAC ini meletakkan regulasi dan tanggung jawab Kantor Informasi dan Internet Negara langsung

dibawah Presiden Xi. Lembaga ini berupaya untuk lebih ketat menegakkan penyensoran online, termasuk mematikan situs web yang tidak mematuhi peraturan sensor, dan meningkatkan prevalensi perspektif pemerintah dengan mendigitalkan propaganda (Roberts, Censored; Distraction and Diversion Inside China's Great Firewall, 2017).

Kebijakan-kebijakan terkait dengan sensor diatas dirasakan oleh sebagian masyarakat Cina sebagai sesuatu yang merugikan. Hak-hak individu yang telah diatur oleh Deklarasi Universal HAM 1948 hampir sulit untuk dirasakan. Sensor secara tidak langsung telah dianggap telah melakukan bayak penyimpangan terhadap nilai-nilai HAM, terutama hak setiap individu dalam memperoleh kebebasan berekspresi. Bentuk penyimpangan-penyimpangan nilai HAM inilah yang kemudian mendorong terbentuknya gerakan-gerakan perlawanan terhadap sensor yang dikenal dengan *anti-censorship movement*.

2.2 Bentuk Penyimpangan Sensor terhadap nilai HAM

Bentuk-bentuk penyimpangan atas permasalahan *censorship* di Cina seringkali disinggung dengan isu-isu HAM. Oleh karena itu, dalam sub bab ini akan dibahas mengenai penyimpangan sensor terhadap nilai HAM. HAM sendiri telah diakui di tingkat Internasional oleh *Universal Declaration of Human Right (UDHR)* dan disahkan oleh Sidang Umum PBB pada tahun 1948 untuk dijadikan batasan setiap individu memperoleh hak dasar yang dimilikinya. Fenomena sensorship diawali dengan kemajuan teknologi internet yang membawa manusia beralih ke dunia digital. Peralihan tersebut tidak berarti melepaskan hak dasar individu yang dimiliki secara offline, melainkan tetap berlaku secara online. Dalam artian, hak yang dimiliki setiap individu secara offline juga harus dilindungi secara online.

Ada dua Pasal dalam HAM yang dianggap paling relevan untuk konteks sensorship. Pertama, Pasal 12 yang berisi perlindungan terhadap setiap individu dari “gangguan terhadap privasi, keluarga, rumah atau korespondensinya”. Kedua, Pasal 19 yang menjamin “hak kebebasan berpendapat dan berekspresi”, yaitu kebebasan dalam hal “mencari, menerima, dan menyebarkan informasi serta ide-ide dalam bentuk apapun, baik secara lisan, tulisan maupun media” (O’Flaherty, 2012). Secara hukum internasional, Cina telah menyetujui isi dari Deklarasi Universal HAM PBB 1948, yang berarti Cina memiliki kewajiban untuk hak-hak yang terkandung didalamnya pada masyarakat domestiknya. Aturan serupa sesungguhnya juga tertera pada konstitusi Cina yang berbunyi bahwa setiap individu berhak atas “kebebasan, pers, berkumpul, berserikat, dan demonstrasi” (Oliveri, *Technological Software That Counters Internet Jamming: Its Role in the U.S. and In Non-Democratic Countries* , 2003). Meskipun aturan-aturan telah secara jelas bersandingan dengan Cina, namun secara aksi, konstitusi tersebut seperti nihil. Tahun 2011, Freedom House menetapkan Cina sebagai peringkat pertama dari lima negara dengan kebebasan internet dan media terendah (Thomas Lum P. M., 2012).

Dalam banyak kasus di Cina, internet telah membuat individu terpaksa harus menghadapi banyak bentuk penyimpangan HAM. Transisi hak ke ranah digital, khususnya dalam hal “kebebasan berekspresi” sering kali dibatasi pemerintah dengan kebijakan sensor yang diterapkan pemerintah Cina. Peraturan terkait lisensi para pembuat konten internet justru semakin mempersulit mereka untuk menyuarakan aspirasinya karena harus melalui pemeriksaan dari pemerintah. Banyak sekali konten-konten, berita, website, dan hal-hal sensitive lain yang menjadi sasaran penyensoran dan pemblokiran yang dilakukan oleh pemerintah. Salah satu kata yang masuk kedalam list sensor Cina adalah “protes

Tiananment”. Kata-kata ini hampir tidak bisa lagi di temukan di mesin pencarian Cina. Selain dari itu, berita-berita terkait korupsi pejabat pemerintah serta pemblokiran media barat seperti google, youtube dll. Media sebagai tempat untuk berekspresi juga sering kali menjadi sumber atas tindakan represif pemerintah. Seperti yang terjadi pada sejumlah activist, jurnalis, dan pengguna media sosial lain yang akhirnya banyak dipenjara hanya karena menyuarakan aspirasinya di media. Kasus seperti ini terjadi pada seorang aktivis perjuang hak di China Liu Xiaobo dijatuhi hukuman sebelas tahun penjara karena mengadvokasi reformasi demokrasi dan memperjuangkan hak kebebasan berbicara melalui media. Kemudian, seorang wartawan di Cina yang bernama Tan Zuoren dijatuhi hukuman lima tahun penjara karena mengungkap korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemerintah lewat media.

Penyimpangan hak privasi individu akibat dari kebijakan sensor pemerintah Cina juga telah menarik perhatian banyak masyarakat. Penyimpangan tersebut terbukti dengan terus munculnya data pribadi yang dapat diakses oleh pihak ketiga baik itu pemerintah, perusahaan maupun penjahat. Seperti yang terjadi pada seorang jurnalis Cina yang bernama Shi Tao. Identitasnya diberikan oleh pihak perusahaan besar Yahoo kepada pemerintah Cina, dan menyebabkan ia dipenjara selama 10 tahun (Ben Wagner, 2015).

Penyimpangan-penyimpangan sensor terhadap nilai HAM diatas merupakan beberapa dari sekian banyak penyimpangan yang terjadi di Cina. Dan alasan ini yang kemudian memicu terbetuknya gerakan perlawanan terhadap sensor yang disebut dengan *anti-censorship movement*. Berlandaskan pada pemahaman HAM secara universal, *anti-censorship movement* Cina memperjuangkan isu perubahan kebijakan sensor di Cina dengan menggunakan berbagai startegi. Penggunaan nilai-nilai HAM pada isu ini juga termasuk

dalam salah satu strategi jaringan untuk melakukan politik informasi. Karena isu-isu yang berhubungan dengan nilai HAM dianggap dapat menarik atensi masyarakat internasional karena HAM merupakan nilai universal yang dimiliki setiap individu.

2.3 Kemunculan *Anti-censorship movement* di Cina

Jika melihat kilas balik perkembangan sensor di Cina, ada banyak sekali strategi sensor yang diterapkan pemerintah Cina untuk mengawasi masyarakatnya, namun tak jarang dari mereka dapat lolos dari dinding penyensoran. Seperti yang disampaikan Giddens terkait “*dialectic of control*”, yang berarti bahwa apa yang kita lihat aman dan terkendali sesungguhnya bisa jadi tidak demikian. Mudahnya, apa yang kita lihat belum tentu itulah yang sebenarnya terjadi (Wibowo, 2000). Kaitannya dengan negara Cina adalah, sekilas kita melihat masyarakat agak apatis dengan kebijakan sensor di Cina namun sesungguhnya ada aksi perlawanan antara keduanya. Hal ini terlihat dengan kemunculan sejumlah *anti-censorship movement* di Cina.

Dari level individu, *anti-censorship movement* hadir dari masyarakat Cina sendiri, diantaranya para aktivis HAM, jurnalis, dan warga sipil. Di level ini, *anti-censorship movement* muncul akibat tindakan represif pemerintah terhadap pembatasan kebebasan berekspresi masyarakatnya. Aksi pemerintah dalam memblokir situs-situs, konten, dan artikel berita yang terjadi telah mendorong tindak balasan para aktivis HAM khususnya para pendukung kebebasan berbicara untuk turut memperjuangkan kebebasan berbicara bagi masyarakat Cina. Beberapa diantara para aktivis HAM yang melakukan aksi perlawanan terhadap sensor ialah Zhen Jianghua, melibatkan dirinya dalam pembuatan sebuah platform yang disebut dengan *Human Right Campaign*, platform ini dibuat untuk mempublish

informasi terkait isu pelanggaran HAM di Cina termasuk didalamnya adalah isu penyimpangan dalam hal kebebasan berekspresi. Selain itu, ia juga mendirikan ATGFW.org untuk menyediakan informasi dan bantuan teknis yang dapat membantu masyarakat Cina melewati The Great Firewall of China (Defenders, 2017). Platform tersebut ia sosialisasikan kepada para pelajar agar mereka dapat dengan mudah melewati sensor internet yang dilakukan pemerintah (Watch, China: Free Anti-Censorship Activist, 2018). Selain itu, aktivis HAM peraih Nobel Perdamaian Liu Xiaobo juga ikut memperjuangkan isu sensor dengan meluncurkan petisi online mengenai HAM dan demokrasi. Lalu activist HAM lainnya ada Han Han yang mana ia menggunakan media blogger dan kemampuannya dalam menulis untuk memobilisasi pengikutnya melawan sensor (Giorgio Strafella, 2015).

Selain itu, kehadiran sensor juga turut menggerakkan para jurnalis untuk menyelamatkan hak-hak profesinya tersebut. Perjuangan para jurnalis ini nampak dalam sebuah protes yang terjadi di depan markas besar *Southern Newspaper*. Di sebuah media pemberitaan *Bloomberg* dinyatakan bahwa ratusan massa melakukan unjuk rasa di depan kantor tersebut. Dimana di dalam kerumunan massa tersebut hadir sejumlah jurnalis yang tampak menyerukan kebebasan pers dan menyatakan dukungan terhadap karyawan editorial surat kabar. Disebutkan pula bahwa staff editorial surat kabar banyak yang melakukan pemogokan terhadap sensor pemerintah (Kaiman, 2013).

Merespon sensor internet yang terjadi di Cina, sejumlah warga sipil dari domestik Cina itu sendiri juga ikut menyuarakan protes menggunakan video, foto, dan simbol-simbol. Salah satu contoh protes yang dilakukan adalah dengan menggunakan video yang berjudul *grassmud horse* sebagai maskot untuk menyuarakan kebebasan berekspresi di tahun 2009.

Video ini kemudian disebarluaskan melalui media pribadi masing-masing individu sehingga langsung menjadi topik menarik di Cina hanya dalam seminggu. .

Dari level kelompok, muncul GreatFire yang merupakan organisasi anti-sensor yang mengkampanyekan hak berekspresi masyarakat Cina dengan menciptakan perangkat lunak dan website yang bernama *Greatfire.org*. *Greatfire.org* ini memiliki misi untuk memberikan kebebasan berbicara secara online bagi masyarakat. Jaringan ini berfungsi untuk menghindari sensor yang dilakukan oleh pemerintah Cina. Didirikan pada tahun 2011, dan dipelopori oleh aktivis dengan nama samaran Charlie Smith, Jamie dan Martin Johnson. Didalam perangkat lunak dan website GreatFire, terdapat beberapa layanan diantaranya Analyzer, FreeBrowser, Circumvention Central, GreatFire Analyzer, FreeBooks, FreeWeibo, FreeWeChat, dan GitHub Wiki. Program-program tersebut dibentuk untuk memudahkan pengguna dalam memahami bagaimana sensor pemerintah Cina dioperasikan dan bagaimana kemudian pengguna dapat menemukan informasi-informasi yang disensor (*GreatFire.org*) GreatFire sempat memenangkan award “*The 2013 Deutsche Welle ‘Best of Online Activism’*” untuk kategori “*Best Innovation*”. Perjuangan mereka melawan sensor dengan sistem pemerintah Cina yang bersifat otoriter mendapat apresiasi baik dari organisasi HAM internasional.

Kelompok lain datang dari media pemberitaan yaitu *China Digital Times*, yang mana mereka secara teratur menerbitkan tulisan yang berisikan tata cara menghindari sensor pemerintah. Selain itu, media ini juga sangat responsive dalam menanggapi laporan-laporan terkait sensor. Hal ini nampak pada postingan media tersebut mengenai daftar kata-kata yang disensor oleh pemerintah Cina. Menurut sebuah sumber, list kata yang disensor tersebut merupakan hasil dari laporan dari warga Cina itu sendiri. Hal serupa juga nampak pada aksi

China Digital Times merespon protes online dibawah slogan “*grassmud horse*” dengan mendigitalkan *grassmud horse lexicon*.

2.4 *Anti-censorship Movement* sebagai Jaringan Advokasi Transnasional

Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian kerangka konseptual, dalam memperjuangkan isu yang dibawa, suatu pergerakan dapat menggunakan jaringan transnasional untuk memperkuat pergerakannya. Jaringan transnasional ini setidaknya terdiri dua negara yang berbeda. Keck dan Sikkink menjelaskan bahwa jaringan ini terbentuk karena adanya blokade antara pemerintah dan juga aktor domestik, yang menyebabkan aktor-aktor tersebut akhirnya berupaya mencari solusi diluar domestik dengan cara membangun jaringan dengan aktor-aktor di luar wilayahnya. Jaringan tersebut kemudian terbentuk karena memiliki pemikiran yang sama baik itu mengenai ide-ide, norma, ataupun kebijakan. Mereka nantinya saling berkolaborasi dalam hal pertukaran informasi dan pengalaman, serta saling mendukung untuk mencapai tujuan yang sama. Cara pengimplementasiannya sering kali melibatkan aktivis individu, negara, NGO, IGO, bahkan pejabat pemerintahan untuk turut andil dalam upaya mengadvokasi isu.

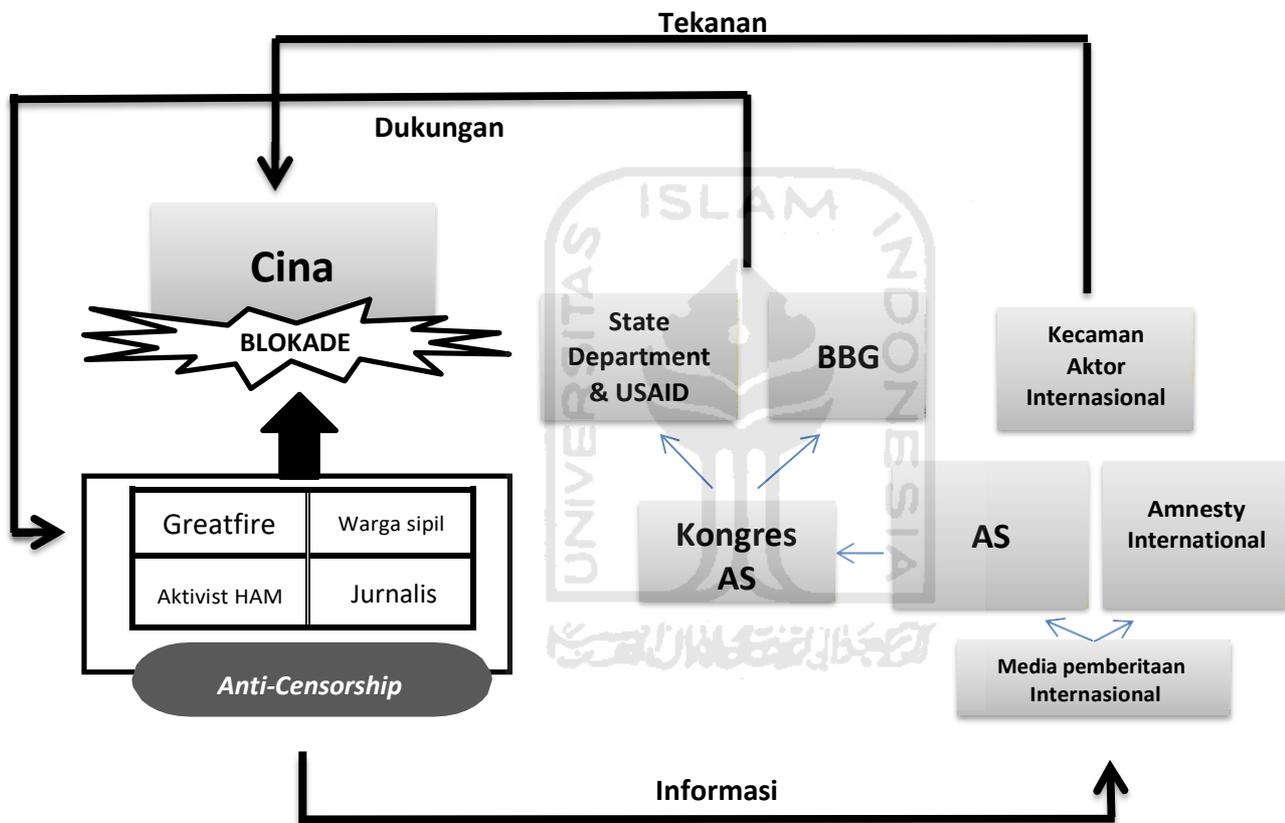
Sebuah jaringan umumnya bersifat informal dan terbatas pada perpaduan komunikasi informasi dan gagasan yang tidak terorganisasi. Serta cenderung memiliki tingkat keterikatan dan kerjasama paling rendah dalam organisasi formal (Joe Bandy, 2005). Semua jaringan sosial secara inheren merupakan makna dari “jaringan”. Namun dalam kasus TAN, makna tersebut membentuk sentimen moral atau keyakinan tentang hak dan kewajiban aktor tertentu dalam hubungannya dengan orang lain. Jadi, yang mendasari jaringan transnasional menjadi perhatian kita disini adalah sentralisasi gagasan atau nilai berprinsip yang mendorong

pembentukan jaringan (Noakes, 2011). Kemunculan jaringan yang diakibatkan oleh tertutupnya akses aktor domestik terhadap pemerintah tadi memunculkan apa yang kemudian disebut oleh Kick dan Sikking sebagai pola boomerang (*Boomerang Pattern*).

Pada studi kasus *anti-censorship movement* di Cina, *boomerang pattern* terjadi seperti di Bagan 2.4.1 berikut. Jaringan *anti-censorship movement* terbentuk karena adanya kekecewaan aktor domestik Cina diantaranya activist HAM, jurnalis, masyarakat sipil, dan juga kelompok *greatfire* terhadap sensor yang dilakukan oleh pemerintahnya yang dinilai tidak adil karena telah merenggut hak-hak individu masyarakat Cina atas kebebasan berekspresi, privasi dan seringkali juga menyebabkan tindakan kekerasan terhadap para pelanggar sensor, terutama yang terjadi pada activist HAM yang melakukan perlawanan terhadap sensor di Cina. Dalam memperjuangkan ketidakadilan tersebut, aktor-aktor tidak memiliki akses kepada pemerintah untuk menyuarakan aspirasinya dikarenakan kondisi domestik Cina yang dipengaruhi oleh partai tunggal “Komunis”, menjadikan aspirasi-aspirasi masyarakat sulit untuk didengarkan atau bahkan tidak sama sekali dihiraukan. Blokade tersebut kemudian memicu terbentuknya jaringan perlawanan yang disebut dengan *anti-censorship movement* yang mana terdiri dari sejumlah activist HAM, jurnalis, warga sipil, dan organisasi yang bernama *greatfire*. Pembentukan tersebut terjadi karena adanya suatu nilai yang sama-sama ingin diperjuangkan yaitu mewujudkan nilai HAM khususnya nilai kebebasan berbicara di Cina dengan merubah kebijakan sensor. Dalam pelaksanaannya, jaringan *anti-censorship movement* melakukan komunikasi dan juga interaksi pertukaran informasi di antara anggota jaringan melalui media, yaitu email dan juga informasi yang dibawa oleh media pemberitaan domestik (*China Digital Times*). Terbatasnya ruang gerak di Cina ini mendorong para *anti-censorship movement* mencapai luar negeri untuk mencari

dukungan dan visibilitas yang memungkinkan adanya perlindungan dan bantuan advokasi untuk menekan pemerintah agar mengubah perilakunya terhadap masyarakatnya terkait dengan kebijakan sensor yang di terapkan di Cina.

Bagan 2.4.1 *Boomerang Pattern* pada studi kasus *anti-censorship movement*



Pencarian dukungan berupa jaringan transnasional yang dilakukan oleh *anti-censorship movement* dilakukan melalui politik informasi. *Anti-censorship movement* disini melakukan politik informasi dengan menggunakan bantuan media pemberitaan nasional (*china digital times*) maupun internasional (*human right watch, washington post, reuters, wall street journal,*

bloomberg, dan juga techcrunch) untuk menarik posisi negara barat khususnya AS yang sangat menjunjung tinggi penegakkan HAM dunia agar turut mendukung perjuangan mereka. Dalam melakukan politik informasi ini, jaringan seringkali mendramatisasi isu dengan mengaitkan isu yang dibawa dengan nilai HAM. Politik informasi yang dilakukan *anti-censorship movement* tersebut kemudian berhasil menarik AS untuk turut memperjuangkan isu tersebut. Keberhasilan *anti-censorship movement* dalam mempengaruhi AS semakin ditunjukkan dengan masuknya bantuan dari kongres AS, *state department*, USAID, dan juga BBG untuk ikut berpartisipasi dalam mengadvokasi jaringan. Bantuan advokasi yang diberikan oleh aktor-aktor tersebut fokus pada bantuan pendampingan dari lembaga-lembaga yang khusus dibentuk untuk permasalahan censorship, pendanaan jaringan, dan bantuan penyediaan teknologi pengelak sensor dan asistensi penggunaan teknologi tersebut. Selain dari AS, *state department*, USAID, dan juga BBG, *anti-censorship movement* juga berhasil menarik NGO yaitu *amnesty international*. *Amnesty international* disini membantu *anti-censorship movement* dalam menekan PBB untuk segera menindak lanjuti perubahan kebijakan sensor di Cina yang jelas melanggar nilai-nilai HAM yang ada pada Deklarasi Universal HAM PBB 1948. Selain dari pada itu, jaringan advokasi transnasional tersebut juga telah menarik sejumlah aktor internasional diantaranya Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton dan Rosean Rife selaku Direktur Riset Asia Timur Amnesty International untuk memberikan bantuan advokasi dalam bentuk kecaman terhadap pemerintah domestik Cina atas kebijakan sensor yang dilakukan.

BAB III

ANALISIS UPAYA *ANTI-CENSORSHIP MOVEMENT* DALAM MENYIKAPI KEBIJAKAN SENSOR DI CINA

Pada bab ketiga ini, penulis akan membahas mengenai upaya atau usaha *anti-censorship movement* dalam menyikapi censorship di Cina dengan menggunakan konsep Transnational Advocacy Network (TAN). Dalam rangka melancarkan tindakannya, konsep TAN menawarkan empat strategi yang dapat digunakan oleh *anti-censorship movement* untuk saling berinteraksi dan saling berkontribusi dalam mencapai tujuan. Empat strategi yang ditawarkan yaitu; *Information Politik*, *Symbolic politik*, *Leverage Politik*, dan *Accountability Politik*.

3.1 *Information Politic*

Strategi *information politic* ini merupakan strategi yang ditempuh dengan cara mengumpulkan informasi secara cepat untuk mendorong tercapainya tujuan. Pada strategi ini, informasi dijadikan sebagai alat paling penting untuk menggerakkan target. Informasi dianggap sebagai hal yang paling fundamental dalam mencapai keberhasilan sebuah jaringan advokasi yang sifatnya transnasional. Dalam penelitiannya, Keck and Sikkink menjelaskan bahwa “*the most valuable trading currency*” dapat dihasilkan melalui kemampuan dalam menghasilkan informasi (Sikkink M. E., 1999). Oleh karena itu, kemampuan sebuah jaringan advokasi dalam pendistribusian informasi menjadi kekuatan besar, karena melalui isu-isu yang mereka bawa, informasi dapat sampai kepada masyarakat dan dapat pula menarik perhatian aktor-aktor internasional. Jaringan juga harus memiliki informasi yang terpercaya dan juga kemampuan untuk mendramatisasi isu agar terlihat lebih kredibel dan menarik perhatian masyarakat umum.

Dalam kasus ini, jaringan advokasi transnasional terdiri dari individu, dan beberapa NGO yang melakukan *information politic* dengan berbagai cara. Secara fungsional, *anti-censorship* memiliki peran ganda dalam menjalani *information politic*. Mereka merangkap dirinya sebagai aktor sekaligus sumber informasi bagi isu yang dibawa. Karena dalam perjalanannya, aktivis *anti-censor* menjadi bagian dari sasaran pemerintah atas sensor yang diterapkan di Cina. Oleh karenanya, informasi dapat dihasilkan dari pengalaman pribadi aktivis itu sendiri, hasil pengamatan, maupun laporan yang diberikan oleh pihak terkait. Disamping itu, pengumpulan dan pendistribusian informasi juga dilakukan dengan bantuan media, baik itu website, platform, dan media sosial lainnya. Untuk melewati hambatan dalam pelaksanaan *information politic*, jaringan ini juga menciptakan alat-alat yang secara umum dapat berfungsi untuk menerobos sensor. Disini, internet menjadi sarana komunikasi substansial dalam pengumpulan dan pendistribusian informasi, serta dalam menentukan tindakan kolektif yang akan dilakukan. Internet juga membuka jalan bagi masyarakat sipil Cina untuk menghindari dari media tradisional yang seringkali dikendalikan oleh negara dan penuh dengan propaganda pemerintah.

Dalam pelaksanaannya, aktivis *anti-censorship* melibatkan dirinya untuk menindak lanjuti aksi pemerintah dengan cara mempublikasi aksi sensor dan tindakan represif pemerintah ke media sosial atau dengan melaporkannya ke pihak yang dianggap dapat membantu mereka untuk menciptakan ruang berekspresi. Seperti yang dilakukan Han-han yang merupakan seorang blogger terkenal dan penulis buku terlaris di Cina. Ada banyak tulisan-tulisan Han yang disensor pemerintah, bahkan namanya kini telah masuk kedalam daftar kata yang disensor di Cina. Menanggapi hal tersebut, Han menggunakan media dan kemampuannya dalam menyusun narasi untuk mengkritik pemerintah terkait sensor. Posisinya sebagai blogger terkenal di Cina ia gunakan untuk memobilisasi netizen agar sadar dan turut bertindak dalam menghadapi dan

menyebarkan isu yang tengah mereka hadapi. Tulisannya kemudian menghasilkan respon yang cukup baik oleh masyarakat dunia maya sehingga menghasilkan 25.000 komentar dan dilihat oleh lebih dari 1,2 juta orang. Tak hanya berhenti sampai disitu, tulisan Han juga di posting ulang oleh para pembacanya sehingga mencapai lebih dari 45.000 tautan (Giorgio Strafella, 2015).

Ketika terdeteksi adanya bentuk-bentuk penyensoran yang terjadi di Cina, *anti-censor movement* secara aktif melaporkannya ke media pemberitaan seperti *China Digital Time*, *Human Right Watch* dan juga *Washington Post* agar informasi tersebar lebih luas. Menindak lanjuti aksi tersebut, *China Digital Time* dengan segera memposting list kata yang disensor ke lamannya agar diketahui oleh lapisan masyarakat yang lebih luas. (Watch, Race to the Bottom; Corporate Complicity in Chinese Internet Censorship, 2006).

Begitu pula dengan Zhen Jianghua, melibatkan dirinya dalam advokasi isu HAM di Cina dengan membuat sebuah platform yang disebut dengan *Human Right Campaign*, platform ini dibuat untuk mempublish informasi terkait isu pelanggaran HAM di Cina termasuk didalamnya adalah isu penyimpangan dalam hal kebebasan berekspresi. Terlepas dari aktivitasnya sebagai seorang aktor jaringan, ia juga dijadikan sebagai subjek informasi karena aktivitas tersebut kemudian membawanya masuk ke dalam tahanan. Tak berhenti di tahanan, ia melanjutkan aksinya dengan mendirikan ATGFW.org untuk menyediakan informasi dan bantuan teknis yang dapat membantu masyarakat Cina melewati The Great Firewall of China (Defenders, 2017) . Platform tersebut kemudian ia sosialisasikan kepada para pelajar agar mereka dapat dengan mudah melewati sensor internet yang dilakukan pemerintah (Watch, China: Free Anti-Censorship Activist, 2018). Dalam kasus ini, media menjadi perpanjangan tangan jaringan untuk menjelaskan keadaan dan isu yang dibawa, melakukan berbagai protes, kampanye, serta

mengadakan pendekatan sejumlah forum, institusi dan organisasi untuk turut mendukung perjuangan jaringan.

Kedua kasus diatas memperlihatkan bentuk advokasi yang dilakukan oleh satu individu yang merangkap dirinya sebagai aktor dan juga sumber informasi atas penyimpangan yang dilakukan pemerintah Cina. Kasus diatas merupakan dua dari banyak kasus terkait *ensorship* yang kemudian disalurkan oleh para anti-sensor lainnya ke berbagai saluran media, pemerintah, organisasi non pemerintah, dan juga institusi penelitian. Selain itu, aktivis *anti-censor* lain secara aktif memantau, membuka, dan menginvestigasi isu sensor di Cina. Ditahap ini, isu yang dibawa biasanya memiliki urgensi dan mengandung sentiment terhadap pemerintah. Kasus *ensorship* di Cina ini mengandung urgensi dari sisi HAM khususnya hak berekspresi dan juga bentuk perlindungan negara terhadap masyarakatnya.

Masih dalam upaya pengumpulan dan pendistribusian informasi, *anti-censorship movement* bekerjasama dengan perusahaan internet asing untuk membangun alat pengelak sensor. Alat tersebut berfungsi untuk membantu pengguna internet Cina lolos dari penyensoran yang dilakukan pemerintah Cina, sehingga dapat mengakses situs-situs yang diblokir pemerintah. Beberapa diantara alat tersebut ialah *Triangle Boy*, *Safe Web*, *DynaWeb*, *UltraReach* dan *Peek-a-Booty* (Oliveri, Technological Software That Counters Internet Jamming: Its Role in the U.S. and In Non-Democratic Countries, 2003). Tidak hanya menyediakan proxy server, *anti-censorship movement* juga menciptakan perangkat lunak yang dapat mendokumentasikan segala bentuk informasi yang disensor pemerintah. Kelompok ini biasa dikenal dengan *greatfire*.

Greatfire mengkampanyekan hak berekspresi masyarakat Cina dengan menciptakan perangkat lunak dan website yang bernama *Greatfire.org*. Didalamnya terdapat beberapa layanan cermin yang mendeteksi konten-konten yang disensor di layanan aslinya. Konten yang disensor

pemerintah, mereka dokumentasikan di layanan cermin tersebut, yaitu; *FreeBrowser*, *Circumvention Central*, *GreatFire Analyzer*, *FreeBooks*, *FreeWeibo*, *FreeWeChat*, dan *GitHub Wiki* (GreatFire.org). Program-program tersebut dapat memudahkan pengguna dalam memahami bagaimana sensor pemerintah Cina dioperasikan dan bagaimana kemudian pengguna dapat menemukan informasi-informasi yang disensor.

GreatFire secara aktif membangun jaringan dengan beberapa aktor luar negeri yang saat ini menjadi dewan penasihatnya yaitu senior muda di *New America Foundation* Rebecca Mackinnon, seorang blogger terkenal China Isaac Mao, dan James Vasile dari *Open Internet Tools Project* dan *Software Freedom Law Center* (GreatFire.org). Mereka secara aktif melakukan bantuan advokasi politik informasi dalam menghadapi pelanggaran yang dilakukan pemerintah Cina. Bantuan tersebut berupa pengumpulan informasi melalui sebuah aktivitas penelitian, penerbitan karya-karya tulis terkait dengan penyimpangan yang dilakukan pemerintah, serta penyediaan alat-alat pengelak sensor.

Untuk mencapai keberhasilan dalam strategi politik informasi, jaringan sangat membutuhkan kerjasama dengan media lokal dan internasional untuk mendistribusikan informasi yang mereka bawa ke masyarakat luas. Dalam hal ini, *GreatFire* juga didukung oleh beberapa media global yang memiliki perhatian terhadap isu HAM, khususnya hak dalam kebebasan berekspresi seperti *Reuters*, *the Guardian*, *Wall Street Journal*, *Bloomberg*, dan juga *TechCrunch*. Media-media global ini secara teratur merujuk pembacanya untuk memberikan dukungan terhadap *greatfire* (Russel, 2015). Selain dari pada itu, *greatfire* beberapa kali aktif dalam menyuarakan aspirasi para pegiat HAM di muka public seperti melalui wawancara media, meskipun mereka tidak pernah menunjukkan identitas aslinya ketika wawancara sebagai bentuk proteksinya dari pemerintah Cina (Ritzen, 2018). Isu-isu yang di distribusikan kemudian menjadi landasan

argument bagi pembela kebebasan lainnya untuk turut andil dalam memperjuangkan hak masyarakat Cina dari kebijakan represif pemerintah Cina.

Alih-alih menghentikan perjuangann jaringan, sensor justru membuat *anti-sensor movement* jadi lebih kreatif dalam memobilisasi informasi sensitif agar dapat terlepas dari sensor. Strategi yang mereka gunakan selanjutnya adalah dengan keunikan bahasa mandarin itu sendiri. Bahasanya yang sangat homophone menjadi strategi cukup baik untuk melewati sensor. Meskipun cara tersebut masih bisa terdeteksi oleh penjaga sensor, tapi setidaknya dapat membuat postingan bertahan 3 kali lebih lama dibandingkan postingan sejenisnya (David Robinson, 2013). Menghindari sensor dengan cara linguistik ini dapat menunda pendeteksian dan penghapusan konten dimedia Cina. Karena hal itu bergantung dengan bagaimana si penjaga sensor menafsirkan postingan yang mengandung homophon tersebut. (Kei Yin Ng, 2018)

Dalam kasus ini, penulis melihat adanya dramatisasi isu yang dilakukan oleh *anti-censorship movement* dalam penyebaran informasi terkait sensor. Isu yang mereka angkat seringkali melibatkan nilai-nilai HAM universal khususnya hak masyarakat untuk mendapatkan kebebasan berekspresi. Isu HAM disini cukup membawa nilai sensitif internasional yang dapat menarik perhatian dan kesadaran masyarakat domestik maupun internasional untuk turut ikut membantu perjuangan. Hal ini dapat dibuktikan dengan munculnya banyak pemberitaan media yang menggambarkan posisi kekejaman pemerintah Cina atas pengambilan hak-hak masyarakat untuk dapat berpendapat diruang publik. Muncul laporan-laporan mengenai jumlah korban pelanggaran HAM yang diakukan Cina. Dan pemberitaan terkait taktik pemerintah Cina dalam menjalankan strategi propaganda untuk mengalihkan perhatian masyarakatnya.

3.2 *Symbolic Politic*

Strategi *symbolic politic* merupakan strategi yang dilakukan dengan menggunakan simbol-simbol yang dapat menarik perhatian dan memberikan penjelasan yang meyakinkan untuk dapat menghimpun dukungan masyarakat. Dalam upaya mempengaruhi dan menciptakan kesadaran masyarakat atas isu sensor yang terjadi di Cina, *anti-censorship movement* melakukan protes secara online dengan menggunakan gambar, video, lagu, puisi, jingle, sindiran, dan bentuk pengkodean kata lainnya.

Meski pemerintah Cina berhasil membangun sensor yang sangat canggih, namun tidak sepenuhnya sirkulasi informasi dan akses internet di Cina berhasil disensor sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini dapat terlihat pada protes online yang tetap dapat dilakukan oleh *anti-censorship movement*. Sensor menjadikan aktivis Cina lebih kreatif dalam mendistribusikan informasi dibandingkan dengan aktivis lain yang berada negara-negara demokratis. Untuk menghindari penyensoran saat protes dan distribusi informasi, mereka menggunakan analogi, metaphor, satir, dan cara penghindaran unik lainnya. Sifat khas bahasa mandarin memberikan penawaran baru bagi para *anti-censorship* untuk terhindar dari sensor Cina. Dapat dilakukan dengan cara mengganti karakter yang dilarang dengan karakter lain yang memiliki bunyi mirip tapi berbeda makna (homophone) atau (homograf) (Gary King J. P., 2013).

Sejak penyensoran diberlakukan diatas slogan “membangun masyarakat yang harmonis”, anti-censor mulai menyebut penyensoran konten internet dengan homophone dari kata “harmonis”. Harmonis dalam bahasa mandarin berbunyi (和谐 , dibaca he xi ´ e´) dan merupakan homophone dari kata *river crab* (河蟹 , dibaca he´ xie´). Kata “*River Crab*” menunjukkan seseorang yang menggunakan kekuasaannya untuk melakukan kekerasan. Foto kepiting dijadikan salah satu simbol protes terhadap sensor oleh warganet Cina. Sejak saat itu,

citra seekor kepiting telah menjadi ikon satir baru yang bermuatan politik dan kerap digunakan untuk menyuarakan perlawanan terhadap sensor (Chaya Hiruncharoenvate, 2015).

Pada awal 2009, muncul sebuah video hewan dengan judul “*Grass Mud Horse*” yang merupakan homophon dari “cao ni ma”. Dalam seminggu, video tersebut menjadi ramai di media dan menjadi maskot para pengguna media Cina untuk memperjuangkan kebebasan berekspresi. Video tersebut dibuat untuk menjelaskan keadaan internet Cina yang tengah diperebutkan. Langkah ini kemudian dilanjutkan oleh *China Digital Times* dengan membuat “*Grass Mud Horse Lexicon*” yang berbentuk online. *Grass Mud Horse Lexicon* merupakan terjemahan glosarium yang lebih dari 200 istilah serupa dan kemudian disebarakan kepada warganet di Cina (Commission, 2011). Dalam melakukan sebuah perlawanan, strategi *symbolic politic* menjadi cara yang cukup penting bagi sebuah jaringan dan *anti-censorship movement* telah merepresentasikannya dengan bentuk kreativitas yang cukup baik. Meskipun cara ini tidak begitu efektif untuk menghindari sensor karena pada banyak kasus yang terjadi, penggunaan homophone dan bentuk pengkodean lainnya masih tetap dapat disensor. Namun setidaknya, penggunaan homophone lebih bisa bertahan 3 kali lebih lama dibandingkan dengan postingan yang sama ketika tidak diubah. Waktu tambahan ini akan memungkinkan pesan tersebut lebih banyak disebarakan dan diteruskan ke orang-orang.

Sebuah analisis empiris menyatakan bahwa cara ini cukup baik karena dapat membebani para pekerja sensor. Pekerja sensor tidak dapat secara langsung memasukkan kosakata homophone yang terdeteksi sensitif ke dalam daftar kata yang di blokir, karena hal tersebut akan dapat menimbulkan kekeliruan penyensoran terhadap sebagian besar pesan harian di Sina Weibo. Sebuah penelitian menyatakan bahwa setidaknya ada 20 juta postingan perharinya di Sina Weibo atau sekitar 20% dari jumlah seluruh pesan harian (Chaya Hiruncharoenvate, 2015). Hal ini yang

kemudian cukup menjadikan beban dan kekhawatiran para petugas sensor untuk tidak bertindak ceroboh dalam memasukan kata homophon ke dalam list kata yang disensor. Permainan kata ini pula memberikan jalan baru bagi *anti-censoship movement* untuk membagikan informasi pada masyarakat.

3.3 Leverage Politic

Strategi ketiga ini mencoba menarik aktor-aktor yang memiliki power yang kuat untuk turut terlibat dalam usaha mempengaruhi kebijakan suatu negara dan memperkuat pergerakan jaringan advokasi transnasional tersebut. Robert Bill berpendapat bahwa efektifitas strategi ini bergantung pada kemampuan jaringan dalam menekan dan mempersuasi aktor yang ditargetkan untuk merubah perilakunya. Strategi ini terbagi menjadi 2 yaitu material dan moral. Material berarti bantuan advokasi berupa uang, barang, atau keuntungan lainnya. Sedangkan moral merujuk pada mobilisasi rasa malu yang akan menempatkan perilaku target menjadi pusat perhatian internasional. Pada kasus ini, kedua strategi diatas sangat penting dan cukup sulit untuk diterapkan di Cina. Padahal, faktor terbesar keberhasilan perubahan perilaku target biasanya ditentukan oleh kemampuan jaringan dalam menerapkan kedua strategi ini.

Dalam kasus censorship di Cina, pengaruh material belum dapat diterapkan oleh jaringan. Hal ini disebabkan karena keterbatasan jaringan dan kondisi ekonomi Cina itu sendiri. Pada dasarnya, perekonomian Cina sudah cukup stabil untuk tidak menerima bantuan ekonomi dari negara barat. Sejak tahun 2010-2013 Cina menempati posisi kedua setelah AS dengan perekonomian terbesar di dunia (Gray, 2017) (WawamuStats, 2018). Hal ini dapat dilihat pula dari kepercayaan diri pemerintah Cina melepaskan banyak perusahaan teknologi besar dunia untuk tidak beroperasi di negaranya lagi, seperti Yahoo, Google, Youtube dan lainnya. Namun

bagi *anti-censorship movement*, bantuan material berperan sangat signifikan yaitu untuk mengembangkan teknologi baru yang dapat mendukung kebebasan berekspresi di Cina.

Sedangkan pengaruh moral yang digunakan jaringan *anti-censorship* ialah dengan mengangkat nilai Hak Asasi Manusia secara universal. Dalam *leverage politic* ini, substansi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB tahun 1948 dijadikan acuan dan latar belakang perjuangan jaringan *anti-censorship*. Prinsip-prinsip yang terkandung didalamnya diambil sebagai landasan untuk menyikapi sensor dan mendapatkan kebebasan berekspresi di Cina. Pengaruh moral yang dibawa oleh *anti-censorship movement* berperan cukup baik untuk menarik aktor-aktor kuat dalam lingkup internasional seperti Amerika Serikat dan beberapa organisasi non pemerintah untuk turut mengadvokasi isu yang mereka bawa.

Bentuk dukungan yang diberikan Amerika Serikat berupa pembentukan kebijakan yang mempromosikan kebebasan internet. Selama awal tahun 2000-an upaya AS terhadap kebebasan berekspresi di Cina berfokus pada pengelakan sensor. Pada tahun 2000, kongres membentuk Congressional Executive Commission in China (CECC). CECC ini dibentuk untuk memantau kepatuhan Cina terhadap standar HAM secara internasional, untuk mendorong pengembangan supremasi hukum di RRC dan untuk melaporkan korban-korban pelanggaran HAM di Cina (Figliola, 2018). Upaya ini kemudian semakin didukung dengan pembentukan *President's International Strategy for Cyberspace* pada tahun 2011. Pembentukan ini bertujuan untuk menguraikan prioritas strategi dan kebijakan terkait infrastruktur dan teknologi digital. Strategi tersebut menetapkan sejumlah tujuan mencakup peningkatan aktivitas ekonomi, peningkatan kemampuan individu untuk berkomunikasi satu sama lain, menjaga kebebasan berekspresi, berserikat, meningkatkan privasi individu, serta menjaga keamanan nasional dan internasional. Strategi ini menekankan pada pelaksanaan tindakan dengan cara diplomasi dan menciptakan

standar dalam mengatur serta mengoperasikan jaringan digital global, memperkerjakan aktor pertahanan nasional untuk menentang dan melindungi perilaku jahat dunia maya, dan fokus pada pembangunan sumber daya manusia yang dapat meningkatkan kapasitas sistem digital negara berkembang dan akses sistem tersebut oleh populasi di negaranya (Thomas Lum P. M., 2012).

Upaya *anti-censorship movement* untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah AS kemudian kembali membuahkan hasil. Dalam rangka menekan mobilisasi sensor yang dilakukan perusahaan asing di Cina, perwakilan kongres Amerika Serikat Crish Smith menggelar sidang terkait keterlibatan perusahaan besar US dengan sensor di Cina. Sidang tersebut memperjelas bagaimana kemudian perusahaan-perusahaan besar AS membantu pemerintah Cina dalam memobilisasi sensor di Cina. Hari berikutnya, Crish Smith mengumumkan pembentukan *Global Freedom Act* (GFA) pada tahun 2006. Setelah itu, parlemen Eropa mengeluarkan resolusi yang menyambut pembentukan GFA dan mendesak Uni Eropa untuk segera menyetujui pernyataan bersama terkait dengan komitmen untuk melindungi hak pengguna internet serta ikut mempromosikan kebebasan berekspresi di dunia khususnya Cina. Langkah ini diteruskan dengan penyusunan draf kode etik dan juga aturan yang akan mengikat perusahaan internet dan telekomunikasi untuk tetap menegakkan prinsip HAM dalam praktik bisnisnya. Draft ini disusun oleh akademisi, perusahaan dan juga NGO (Watch, “Race to the Bottom” Corporate Complicity in Chinese Internet Censorship, 2006) (China C. E., 2012). Upaya ini dinilai cukup baik, karena dengan dibentuknya undang-undang yang disertai dengan kode etik yang substantif, perusahaan secara otomatis akan terikat dengan aturan yang telah ditentukan dan akan menegakkan standar yang telah di sepakati bersama.

Selain itu, bentuk advokasi lain datang dari industri teknologi informasi dan komunikasi AS yang berkolaborasi dengan organisasi non pemerintah, investor, dan universitas untuk

membentuk Global Network Initiative (GNI) pada tahun 2008. GNI dibentuk untuk mendukung jaringan dalam mempromosikan praktik dan etika bagi perusahaan AS yang beroperasi di negara-negara yang minim akan kebebasan internet seperti Cina. GNI menggunakan pendekatan “*self-regulatory*” untuk menguji kepatuhan dan kesadaran perusahaan pada nilai-nilai Hak Asasi Manusia. Seperangkat prinsip dan mekanisme pendukung dibentuk untuk menjadi panduan bagi para perusahaan TIK dan juga pemangku kepentingan lainnya tentang bagaimana cara melindungi dan memajukan kebebasan berekspresi dan hak privasi ketika dihadapkan dengan tekanan dari pemerintah (Thomas Lum P. M., 2012).

Sejak tahun 2008, kongress memberikan pendanaan sebesar \$95 juta untuk State Department dan USAID dalam mengupayakan kebebasan internet. Kemudian pada tahun 2013, Menteri luar negeri meminta pendanaan sebesar \$27,5 juta untuk kemudian diberikan kepada State Department dan aktivitas kebebasan berekspresi USAID. Pendanaan untuk kebebasan internet tersebut lalu dikelola oleh DRL, *State’s Bureau of Near Eastern Affair* (NEA) dan DCHA, dan dialokasikan dari *Economic Support Fund* (ESF), *Human Rights and Democracy* (HRDF), dan *Near East Regional Democracy* (NERD) (Thomas Lum P. M., 2012).

Program yang dibentuk State Department dan USAID untuk mengadvokasi kebebasan internet berfokus pada bantuan secara teknis yang berupa penyediaan alat pengelak sensor dan teknologi komunikasi yang aman, serta bantuan dalam bentuk advokasi isu, namun belum bisa berjalan dengan baik di Cina karena keadaan lingkungan politiknya yang ketat. Bentuk program dan kegiatan yang dibentuk yaitu (Thomas Lum P. M., 2012);

1. Penyediaan teknologi internet baru , termasuk diantaranya;
 - Teknologi pengelakan yang dapat digunakan untuk mengakses situs yang diblokir dan informasi yang disensor

- Aplikasi internet untuk mengakses informasi yang diblokir dan disensor dengan tetap menjaga anonimitas dari pemerintah dan pemantauan lain.
- Perangkat lunak yang dapat melindungi situs dari serangan dunia maya, serta alat yang dapat dengan mudah memulihkan operasi situs web setelah mendapatkan serangan.
- Teknologi baru yang dapat mengoptimalkan kebebasan internet pada teknologi komunikasi seluler
- Perangkat keras komputer untuk para aktivis agar dapat mengoperasikan internet ketika pemerintah menutup akses mereka terhadap internet

2. Melatih aktivis HAM, masyarakat sipil, dan NGOs dengan tata cara penggunaan teknologi pengelak sensor dan cara menghindari pemantauan pemerintah dan serangan siber,

3. Memberikan pelatihan pendampingan untuk mendukung kelompok masyarakat sipil dan organisasi non-pemerintah menggunakan media teknologi baru untuk meningkatkan komunikasi online mereka,

4. Menanggapi penindasan akses internet dan informasi dengan menekan pemerintah yang represif baik secara pribadi maupun public,

5. Membentuk norma kebebasan internet internasional dengan memimpin diskusi pembentukan kebijakan dan standar internasional dalam forum multilateral termasuk PBB,

6. Memantau kondisi kebebasan internet baik melalui laporan HAM maupun pemetaan penggunaan perangkat lunak oleh pengguna internet,

7. Melibatkan sektor swasta untuk meningkatkan upaya memperluas perannya dalam mempromosikan kebebasan internet,

Tahun 2008, *State Department* membuat program yang mendukung keamanan digital, advokasi kebijakan, teknologi, dan penelitian untuk membantu pengguna internet global

mengatasi hambatan akses internet, termasuk *Freedom Online Coalition (FOC)*. FOC ini terdiri dari sekelompok pemerintah yang bekerjasama untuk memajukan HAM secara online. Termasuk diantaranya membangun dukungan untuk membentuk narasi dan statemen bersama terkait kebebasan internet, agar terbentuk norma global tentang HAM secara online. Tahun 2012, kelompok ini membentuk sebuah proyek yang disebut dengan *Digital Defenders Partnership*. Kerjasama ini memiliki sejumlah tujuan yang mengarah pada pemenuhan hak online para pengguna internet (Figliola, 2018).

State Department juga telah memasukkan kebebasan internet sebagai bagian dari agenda hak asasi manusia globalnya. Hal ini berjalan disesuaikan pada komitmen internasional terhadap kebebasan berekspresi dan arus informasi bebas sebagai HAM yang fundamental. Sejak tahun 2008, The State Department telah menginvestasikan lebih dari \$ 145 juta untuk program kebebasan internet global. Beberapa upaya yang dilakukan *State Department* diantaranya (Figliola, 2018, p. 2);

- Meningkatkan konsen terhadap pembatasan internet dengan pemerintah luar,
- Kolaborasi dengan pemerintah yang memiliki pemikiran sama untuk memajukan kebebasan internet, termasuk dalam forum multilateral seperti dewan HAM PBB, G7, dan G 20,
- Bekerja dengan mitra antar lembaga dan pemangku kepentingan untuk memajukan kebebasan internet, termasuk di forum tata kelola internet tahunan,
- Mengadakan diskusi tentang tantangan kebebasan internet yang muncul,
- Membangun kesadaran di dalam pemerintahan AS dengan melakukan pelatihan tentang masalah kebebasan internet untuk pejabat federal.

Pada tahun 2006, *Global Internet Freedom Task (GIFT)* telah mengkoordinasikan kebijakan *State Department* dan penjangkauan tentang kebebasan internet. Satgas ini mengkoordinasikan

upaya *State Department* untuk memantau kebebasan internet di negara luar and membuat laporan temuan tahunan *State Department* mengenai praktik HAM. Kemudian meningkatkan akses internet di negara yang aktif melakukan pembatasan internet, dan merespon pembatasan atau ancaman terhadap kebebasan internet melalui diplomasi bilateral dan forum multilateral.

Lembaga pemerintah AS lain yang ikut memberikan advokasi adalah *Broadcasting Board of Governors* (BBG). Tugas utama lembaga ini ialah mengawasi penyiar internasional AS termasuk *Voice of America* (VOA) dan *Radio Free Asia* (RFA). Mereka telah menjadi lembaga terdepan yang menggunakan perangkat lunak pengelak sensor. Sebuah laporan mengabarkan bahwa VOA aktif mengirimkan email ke 8 juta pengguna internet Cina setiap harinya yang berisi tentang pemberitaan domestik maupun internasional, dan juga penjelasan tata cara penggunaan *server proxy* untuk menghindari sensor pemerintah. Dengan demikian, pengguna internet dapat mengakses VOA dan website yang diblokir. Dalam perjalanannya, RFA melaksanakan program *Freedom2Connect* dalam beberapa tahun terakhir ini untuk meneliti, mengembangkan dan mengirimkan alat online bagi pengguna internet di Cina agar dapat dengan aman menjelajah, mengirim email serta pesan lainnya. Program lain yang dilakukan RFA yaitu “*how to Scale the Chinese Firewall*”, merupakan salah satu upaya penyiar untuk menginformasikan publik mengenai teknik pengelakkan sensor pemerintah (Thomas Lum P. M., 2012, p. 13).

Selama tahun 2000-an BBG menghabiskan sekitar \$ 2 juta setiap tahunnya untuk membantu pengguna internet di Cina dan negara lainnya agar dapat mengakses situs webnya melalui *server proxy*. Pada tahun 2011, kongress mengirimkan pendanaan ke BBG untuk mengupayakan pengelakkan sensor sebesar \$10 juta, kemudian di tahun 2012 BBG menerima \$ 9,1 juta, dan tahun 2013 BBG meminta peningkatan pendanaan menjadi \$11,6 juta (Thomas Lum P. M., 2012). Tahun 2016, BBG membentuk *Office of Internet Freedom* (OIF) untuk mengawasi upaya

BBG dalam menjalankan proyek kebebasan internet yang didanai, termasuk penelitian, pengembangan, penyebaran, dan penggunaan teknologi kebebasan internet (Figliola, 2018). Program tersebut termasuk tugas yang dilakukan oleh *Open Technology Fund* (OTF).

Dalam sejumlah kesempatan, AS juga mengecam Cina atas pengimplementasian nilai-nilai HAM yang dianggap bertentangan dengan standar internasional yang telah disepakati bersama. Pada dasarnya, semua negara yang termasuk bagian dari PBB berkewajiban menjalankan nilai-nilai HAM di negara terkait sesuai dengan standar yang telah ditentukan, termasuk diantaranya adalah negara Cina. Disisi lain, dapat dilihat bahwa sesungguhnya Cina juga telah menjamin kebebasan berpendapat, berkelompok, dan berkumpul bagi masyarakatnya yang tertera dalam konstitusi RRC pasal 35, berbunyi (Ling, 2010);

“Citizen of the People’s Republic of China enjoy freedom of speech, of the press, of assembly, of association, of procession, and demonstration.”(Pasal 35)

Namun dalam praktiknya, Cina masih memegang predikat salah satu negara dengan pelanggaran HAM terberat setiap tahunnya. Kesenjangan antara perangkat normatif dan praktik implementasi ini yang sering menimbulkan kritik dan kecaman dari berbagai aktor internasional. Salah satunya kritik yang dilayangkan Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton pada Januari 2010. ia menyampaikan pidato mengenai keprihatinannya atas “ancaman arus bebas informasi” yang terjadi di Cina. Kemudian pada Februari 2011, ia menegaskan kembali komitmen AS untuk “melindungi dan mempertahankan internet yang bebas dan transparan” (Thomas Lum P. M., 2012).

Kecaman lain juga datang dari Rosean Rife selaku Direktur Riset Asia Timur Amnesty International. Ia menyampaikan kritiknya terhadap Cina dengan menyatakan bahwa “alasan kedaulatan dan keamanan yang digunakan Cina atas sensor yang terjadi hanyalah kedok belaka.

Hal tersebut telah menjadi serangan hebat bagi kebebasan internet di Cina” (International, Tech Companies Must Reject China’s Repressive Internet Rules, 2015). Disisi lain, amnesty international juga telah mendesak pemerintah international untuk mangambil langkah-langkah berikut ini untuk mempromosikan kebebasan berekspresi di Cina, yaitu (International, Undermining Freedom of Expression in China; The Role of Yahoo!, Microsoft and Google, 2006);

1. Mendesak pemerintah Cina untuk merevisi definisi Undang-Undang “Rahasia Negara” dan kepentingan nasional yang masih kabur, luas dan retroaktif,
2. Mendesak pemerintah Cina untuk menghapus persyaratan verifikasi identitas sebelum mereka dapat mengakses internet,
3. Menekan otoritas Cina untuk menghilangkan persyaratan “persetujuan pemerintah untuk mendapatkan lisensi” bagi organisasi media di Cina,
4. Mengangkat masalah keterlibatan perusahaan dalam pengoperasian sensor yang terjadi di Cina.

Dari pemaparan diatas, dapat dilihat bahwa anti-censorship movement telah berhasil menarik beberapa aktor yang memiliki kekuatan untuk turut memperjuangkan isu yang mereka bawa dengan menggunakan pengaruh moral. Meski demikian, *moral leverage* belum mampu merubah prilaku Cina untuk memberikan hak-hak penuh masyarakatnya. Tapi setidaknya, usaha jaringan telah memberikan kemudahan bagi masyarakat Cina untuk menerobos sensor dengan berbagai alat yang dikembangkan oleh jaringan. Selain dari pada itu, advokasi yang dilakukan jaringan terhadap perusahaan asing yang terlibat dalam pengoperasian sensor sedikit banyak telah mengurangi kekhawatiran aktivis dari terbongkarnya identitas mereka oleh pemerintah Cina. Hal

tersebut secara otomatis juga akan menjauhkan aktivis dari ancaman tindakan represif pemerintah Cina.

3.4 Accountability Politics

Dalam strategi ini, aktor-aktor dari jaringan memiliki peran untuk menjaga dan mengawasi pemerintah agar tidak menyeleweng atau tetap kokoh pada kebijakan yang telah disepakati bersama. Posisi jaringan disini digunakan sebagai penyalaras antara komitmen atau janji yang telah di tetapkan dengan praktik yang dilakukan di lapangan. Startegi ini dibentuk dan dianggap sangat diperlukan dalam konsep TAN ini untuk memastikan tidak adanya penyimpangan yang terjadi dari komitmen yang telah dibuat oleh aktor target.

Dalam kasus censorship di Cina, strategi *accountability politics* belum berhasil dilaksanakan karena pemerintah Cina selaku aktor target belum menyatakan komitmennya untuk mendukung perjuangan jaringan *anti-censorship movement* ini. Hal ini disebabkan karena beberapa kendala yaitu; adanya perbedaan pemahaman HAM di Cina dan HAM Universal, keadaan domestik Cina, dan keterbatasan jaringan itu sendiri. Sejak sebelum dibentuknya kebijakan-kebijakan sensor di tahun 2000an, Cina memiliki pemahaman konsep yang berbeda dengan pemahaman HAM secara universal. Cina menggunakan Konsep Qing dalam memahami konsep HAM yang isinya “hak-hak individu harus sejalan dengan kepentingan negara”. Konsep tersebut cukup menjelaskan hak-hak individu tidak lebih penting dibandingkan kepentingan masyarakat umum. Sehingga prinsip ini menjustifikasi pemerintah Cina untuk mencapai kepentingan negara meskipun dengan cara tidak mengindahkan kepentingan individu. Perbedaan prinsip ini pula yang kemudian menjadi salah satu hambatan bagi aktor jaringan transnasional terkait untuk mengintervensi masalah. Karena bentuk-bentuk intervensi dari pihak luar seringkali

dibenturkan dengan pelanggaran prinsip-prinsip kedaulatan suatu negara. Kedok kedaulatan dan keamanan selalu dijadikan alat bagi pemerintah Cina untuk mempertahankan kebijakan sensor dari kecaman dan tuntutan dunia internasional.

Kemudian, kendala ini muncul dari ranah domestik Cina sendiri. Kebijakan sensor yang diterapkan membuat ruang gerak aktor jaringan semakin sulit sehingga harus berjuang secara sembunyi-sembunyi. Padahal aktor domestik sangat menentukan ketersediaan informasi bagi bagi aktor transnasional untuk menentukan langkah agar dapat merubah kebijakan. Kebijakan-kebijakan hukum terkait sensor di Cina membuat para anggota jaringan lebih sensitive dan was was agar terhindar dari tindakan represif pemerintah. Karena pada pelaksanaannya, lisensi bagi pembuat konten dan perluasan makna dari kata “berita internet” semakin mempermudah pengguna internet untuk terkena hukuman represif dari pemerintah Cina dan semakin sulit untuk mendistribusikan informasi.

Berbagai upaya telah dilakukan *anti-censorship movement* untuk mempengaruhi pemerintah Cina agar merubah kebijakan sensor. Meskipun belum dapat mempengaruhi kebijakan Cina, usaha *anti-censorship movement* telah dapat menarik dukungan AS, Department State, USAID, BBG dan Amnesty International untuk turut mengadvokasi jaringan. Usaha tersebut menunjukkan salah satu keberhasilan jaringan *anti-censorship movement* dalam memperjuangkan isu yang dibawanya. Menurut Keck dan Sikkink, jaringan transnasional dapat memberikan pengaruh dalam lima tahapan, yaitu (Sikkink M. E., 1999) ;

1. Membuat agenda dan isu,
2. Mempengaruhi posisi negara dan organisasi internasional,
3. Mempengaruhi prosedur perubahan,
4. Mempengaruhi perubahan kebijakan aktor target,

5. Mempengaruhi perilaku negara.

Dalam pengaplikasiannya, *anti-censorship movement* telah berhasil melakukan 3 tahap awal. Tahap pertama yaitu pembuatan agenda dan isu. Di tahap ini jaringan berhasil mendapatkan perhatian publik dengan mengangkat isu sensor di Cina dengan mendramatisasi isu menggunakan nilai-nilai HAM Universal. Keberhasilan jaringan ini terlihat ketika *anti-censorship movement* berhasil mempengaruhi beberapa media domestik (*china digital times*) untuk membantu mendistribusikan berita-berita terkait penyensoran yang dilakukan pemerintah, kemudian secara aktif mempublikasikan list kosa kata yang disensor oleh pemerintah, serta mendukung jaringan dalam protes online dengan mendigitalkan *grassmud horse lexicon*. Kemudian, jaringan juga berhasil memprovokasi perhatian beberapa media internasional diantaranya *Reuters, the Guardian, Wall Street journal, Bloomberg, dan juga TechCrunch* untuk turut menyoroti isu censorship yang terjadi di Cina. Bahkan salah satu media besar internasional sempat menggelar wawancara terbuka untuk aktivis anti-sensor di Cina untuk menyuarakan permasalahan sensor yang tengah terjadi di Cina. Dalam tahap ini, komunikasi dan isu-isu yang telah didistribusikan secara internasional ini disoroti sebagai sebuah masalah sehingga menarik aktor internasional lain untuk membantu mencari jalan keluar.

Di tahap kedua, jaringan juga telah berhasil mempengaruhi posisi negara dan juga organisasi internasional untuk turut memberikan dukungan kepada jaringan tersebut. Dukungan datang dari AS yang membentuk CECC untuk mengawasi kepatuhan Cina terhadap standar HAM dan melaporkan korban pelanggaran HAM di Cina. Selain itu, AS juga membentuk *President's International Strategy for Cyberspace* yang bertujuan untuk menguraikan prioritas strategi dan kebijakan terkait infrastruktur dan teknologi digital. Dukungan lainnya datang dari Kongres AS yang kemudian bersedia menggelar sidang terkait keterlibatan

perusahaan besar US dengan sensor di Cina. Sidang tersebut kemudian mendorong terbentuknya *Global Freedom Act* dan penyusunan draft kode etik bagi perusahaan TIK US. Selain itu, kongres juga secara aktif memberikan pendanaan untuk program-program kebebasan internet, yang mana nantinya akan di salurkan kepada State Department, USAID, dan juga BBG untuk mereka jalankan program kebebasan internet.

Di tahap ketiga, penulis melihat adanya perubahan kebijakan terkait dengan aturan dan kode etik yang mengikat perusahaan TIK AS yang akan beroperasi di negara yang minim akan kebebasan berekspresi seperti di Cina. Aturan tersebut akan lebih mengikat perusahaan TIK AS untuk tetap menegakkan prinsip HAM dalam praktik bisnisnya. Perubahan kebijakan ini akan meminimalisir kebocoran identitas pengguna media sosial seperti yang terjadi pada kasus Shi Tao. Ditahap ini, jaringan memperlihatkan adanya hubungan yang semakin kuat antara AS dan juga jaringan advokasi sehingga mempengaruhi perubahan aturan dan kode etik perusahaan TIK AS.

Berdasarkan pengamatan akan kasus sensorship di Cina ini, pengaruh jaringan transnasional *anti-censorship movement* belum berhasil mengubah kebijakan aktor target dan juga perilaku target. Lagi-lagi karena keterbatasan jaringan dan beberapa alasan yang telah disinggung di bagian awal *accountability poitic*. Meskipun kebijakan sensor di Cina belum diubah, namun keberadaan jaringan transnasional juga sudah cukup memberikan banyak pengaruh bagi pergerakan jaringan itu sendiri dan juga masyarakat Cina. Bantuan-bantuan pendanaan dan juga program-program terkait sensor telah memberikan kemudahan bagi para pengguna internet di Cina untuk dapat mengakses hal-hal yang disensor oleh pemerintah Cina.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

2.2 KESIMPULAN

Kekhawatiran akan penggunaan internet di Cina yang kian meningkat akhirnya berhasil mendorong pemerintah Cina untuk terus mengembangkan kebijakan censorship di Cina. Hal ini ditunjukkan dengan aturan-aturan yang diterapkan oleh pemerintah Cina berkaitan dengan pembatasan kebebasan berekspresi dan komunikasi di media sosial. Langkah-langkah yang dilakukan yaitu menciptakan persyaratan lisensi ulang bagi pihak-pihak yang dapat menerbitkan berita, pembentukan lembaga pemerintahan yang difungsikan untuk mengatur semua hal yang berhubungan dengan sensor di Cina, pembentukan perangkat lunak yang sangat canggih yang biasa disebut dengan *The Great Firewall of China*, membentuk pasukan propaganda "*Fifty Cent Party*", penerapan kata kunci, hingga kolaborasi dengan perusahaan asing yang beroperasi di Cina untuk mensukseskan penerapan sensor di Cina.

Aksi censorship di Cina dianggap telah melanggar HAM secara universal. Dua pasal yang dianggap paling relevan dalam konteks ini adalah Pasal 12 yang berisi perlindungan terhadap individu dari "gangguan terhadap privasi, keluarga, rumah atau korespondensinya". Lalu Pasal 19 yang menjamin "hak kebebasan berpendapat, dan berekspresi, yaitu kebebasan dalam "mencari, menerima, dan menyebarkan informasi serta ide-ide dalam bentuk apapun, baik secara lisan, tulisan maupun melalui media".

Dengan berlandaskan nilai HAM secara universal, *anti-censorship movement* membentuk kerangka perlawanan untuk menyikapi censorship yang terjadi di Cina. Bentuk perlawanan *anti-censorship movement* terhadap pemerintah Cina dijabarkan melalui empat strategi yang

terbentuk dalam konsep Transnational Advocacy Network (TAN), yaitu *information politic*, *symbolic politic*, *leverage politic*, dan *accountability politic*. Dalam pelaksanaannya, *anti-censorship movement* telah berhasil menjalankan ketiga strategi diatas. Namun dengan keterbatasan yang di miliki, *anti-censorship movement* belum berhasil membuat pemerintah Cina berkomitmen untuk memperbaiki kebijakan domestiknya mengenai kebijakan sensor di Cina. Hal inilah yang kemudian menyebabkan strategi *accountability politic* belum dapat dilaksanakan.

2.3 SARAN

Berkaitan dengan saran penelitian bagi para peneliti yang akan melakukan penelitian dengan topic yang sama, penulis memberikan beberapa opsi diantaranya;

- a. Pengkajian mengenai *impact censorship* di Cina terhadap hubungan bilateral Cina dengan AS
- b. Pengkajian mengenai keuntungan dan kerugian penerapan censorship terhadap perekonomian domestik Cina

DAFTAR PUSTAKA

BBC. (2013). *China Employs Two Million Microblog Monitors State Media Say*. BBC News.

Beina Xu, E. A. (2017). *Media Censorship in China*.

Ben Wagner, J. B. (2015). *Surveillance and censorship: The Impact of Technologies on human rights*. *European Parliament*, 9.

Bruce, N. C. (2016, oktober 11). *Ilham Tohti, Uighur Scholar in Chinese Prison, is Given Human Rights Award*. Retrieved November 16, 2020, from The New York Times: <https://www.nytimes.com/2016/10/12/world/europe/ilham-tohti-uighur-human-rights-award.html>

Center, C. I. (2012, 09 04). *The Internet Timeline of China (2008)*. Retrieved November 5, 2020, from https://cnnic.com.cn/IDR/hlwfzdsj/201209/t20120904_36019.htm

Chaya Hiruncharoenvate, Z. L. (2015). *Algorithmically Bypassing Censorship on Sina Weibo with Nondeterministic Homophone Substitutions*. *Association for the Advancement of Artificial*.

China, C. E. (2004, Juni 23). *International Treaties, Covenants, and Agreements*. Retrieved Januari 29, 2021, from Library of the Congress: <http://webarchive.loc.gov/all/20040623205930/http://www.cecc.gov/pages/virtualAcad/exp/explaws.php>

China, C. E. (2012). *China's Censorship of the Internet and Social Media; The Human Toll and Trade Impact*. Washington : U.S. Government Printing Office.

CNN. (2019). *Pemerintah China Kembali Sensor Tiananmen di Dunia Maya*. CNN Indonesia.

Commission, C.-E. (2011). *China's Censorship Of The Internet And Social Media: The Human Toll And Trade Impact*. Washington : U.S. Government Publishing Office.

- David Robinson, H. Y. (2013). *Collateral Freedom; A Snapshot of Chinese Internet Users Circumventing Censorship*. OpenITP.
- Defenders, C. h. (2017, Oktober 10). *Zhen Jianghua (甄江华)*. Retrieved Desember 6, 2020, from Chinese human Rights Defenders; Promoting Human Rights & empowering grassroots activism in China: <https://www.nchrd.org/2017/10/19211/>
- Dewanto, P. A. (2017). Advokasi For Bali Dalam Proyek Reklamasi Teluk Benoa Bali (2013-2017). 5.
- Faida, R. E. (2015). Sensor Internet dan Securitized di Era Cyberwarfare: Studi Kasus Tiongkok.
- Figliola, P. M. (2018). Internet Freedom in China: U.S. Government Activity, Private Sector Initiatives, and Issues of Congressional Interest. *Congressional Research Service* .
- Gary King, J. P. (2013). How Censorship in China allow Government Criticism but Silences Collective Expression. *American Political Science Review*, 3.
- Gary King, J. P. (2013). How Censorship in China Allows Government Criticism but Silences Collective Exspression .
- Gary King, J. P. (2017). How Chinese Government Fabricates Social Media Posts for Strategic Discussion, Not Engaged Argument. *American Political Science Review*, 3.
- Giorgio Strafella, D. B. (2015). The making of an online celebrity; A critical analysis of Han Han's blog. *China Information*, 354-355.
- Gray, A. (2017, Maret 09). *The World's 10 biggest economies in 2017*. Retrieved Desember 11, 2020, from World Economic Forum: <https://www.weforum.org/agenda/2017/03/worlds-biggest-economies-in-2017/>
- GreatFire.org*. (n.d.). Retrieved November 8, 2020, from <https://en.greatfire.org/advisory-board>

- Guardian, T. (2018, Juni 29). *The Great firewall of China : Xi Jinping's Internet Shutdown*. Retrieved Desember 11, 2019, from The Guardian : <https://www.theguardian.com/news/2018/jun/29/the-great-firewall-of-china-xi-jinpings-internet-shutdown>
- Guobin, Y. (2008). *The Rise Of Internet Activist In China . EAI Background Brief* , i.
- Harry King, J. P. (2013). *How Censorship in China Allows Government Criticism but Silences Collective Expression*.
- International, A. (2006). *Undermining Freedom of Expression in China; The Role of Yahoo!, Microsoft and Google*. United Kingdom: The Human Rights Action Centre.
- International, A. (2015, Desember 15). *Tech Companies Must Reject China's Repressive Internet Rules*. Retrieved Desember 20, 2020, from Amnesty International: <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2015/12/tech-companies-must-reject-china-repressive-internet-rules/>
- Joe Bandy, J. S. (2005). *Coalitions Across Borders: Transnational Protest and the Neoliberal Order*. Lanham: Rowman and Littlefield Publisher .
- k, M. E. (n.d.). 92.
- Kaiman, J. (2013, Januari 7). *China Anti-Censorship Protest Attracts Support Across Country*. Retrieved Januari 28, 2021, from The Guardian: <https://www.theguardian.com/world/2013/jan/07/china-anti-censorship-protest-support>
- Kei Yin Ng, A. F. (2018). *Linguistic Characteristics of Censorable Language on SinaWeibo*. *Montclair State University Digital Commons* (pp. 12-13). Santa Fe, New Mexico, USA: Department of Computer Science Faculty Scholarship and Creative Works.
- Lee-Makiyama, F. E. (2011). *Digital Authoritarianism: Huamn Rights, Geopolitics and Commerce*. *European Center for International Political Economy (ECIPE)* , 5.

- Ling, Y. (2010). Upholding Free Speech and Privacy Online: A Legal-Based and Market-Based Approach for Internet Companies in China . *Santa Clara High Technology Law Journal*, 7.
- Muhammad, Y. (2014). Dampak Implementasi Kebijakan The Great Firewall oleh Pemerintahan China Terhadap Aktivitas Google Inc di China (2006 – 2012). 2-3.
- News, B. (2018, November 6). *The Great Firewall of China*. Retrieved Januari 30, 2021, from Bloomberg: <https://www.bloomberg.com/quicktake/great-firewall-of-china>
- Noakes, S. W. (2011). *Advocacy Under Authoritarianism; Transnational Networks in China*. Kingston, Ontario, Canada: Queen's University.
- O’Flaherty, M. (2012). Freedom of Expression: Article 19 of the International Covenant on Civil and Political Rights and the Human Rights Committee's General Comment No 34. *Human Right Law Review* , 633.
- Oliveri, P. J. (2003). Technological Software That Counters Internet Jamming: Its Role in the U.S. and In Non-Democratic Countries. *Syracuse University Law and Technology Journal*, 14.
- Oliveri, P. J. (2003). Technological Software That Counters Internet Jamming: Its Role in the U.S. and In Non-Democratic Countries . *Syracuse University Law and Technology Journal*, 12.
- Ritzen, Y. (2018, Juni 21). *Meet the activists fighting the Great Chinese Firewall*. Retrieved Desember 11, 2020, from Al Jazeera: <https://www.aljazeera.com/news/2018/06/21/meet-the-activists-fighting-the-great-chinese-firewall/>
- Roberts, M. E. (2017). *Censored; Distraction and Diversion Inside China's Great Firewall*. United Kingdom : Princeton University Press.
- Roberts, M. E. (2017). *Censored; Distraction and Diversion Inside China's Great Firewall*. United Kingdom: Princeton University Press.

Roberts, M. E. (2017). *Censored; Distraction and Diversion Inside China's Great Firewall*.

United Kingdom: Princeton University Press.

Russel, J. (2015, March 31). *These Activists Are Plotting To End Internet Censorship In China* .

Retrieved Desember 15, 2020, from Tech Crunch :
<https://techcrunch.com/2015/03/30/greatfire/>

Shen, F. (2015). Great Firewall of China . *Encyclopedia of Social Media and Politics*, 3.

Shirk, S. L. (2011). *Changing Media, Changing China*. New York: Oxford University Press.

Sikkink, M. E. (1999). *Transnational Advocacy network in International and Regional Politics*.

Blackwell Publisher.

Sikkink, M. E. (1999). Transnational Advocacy Networks in International and Regional politics.

International Social Science Journal (ISSJ), 92.

Stevenson, C. (2007). Breaching the Great Firewall: China's Internet Breaching the Great Firewall: China's Internet Breaching the Great Firewall: China's Internet. *Boston College International and Comparative Law Review*, 532.

Stevenson, C. (2007). Breaching the Great Firewall: China's Internet Censorship and the Quest for Freedom of Expression in a Connected World.

Stevenson, C. (2007). Breaching the Great Firewall: China's Internet Censorship and the Quest for Freedom of Expression in a Connected World. *Boston College International and Comparative Law Review* , 538.

Tan, Z. (2014). Censorship in translation: The case of the People's Republic of China. 316.

Thomas Lum, P. M. (2012). China, Internet Freedom, and U.S. Policy. *Congressional Research Service*, 3.

Thomas Lum, P. M. (2012). China, Internet Freedom, and U.S. Policy. *Congressional Research Service*, 12.

Wahidmurni. (2017). Pemaparan Metode Kualitatif. 1.

Watch, H. R. (2006). *“Race to the Bottom” Corporate Complicity in Chinese Internet Censorship*. Human Right Watch.

Watch, H. R. (2006). *Race to the Bottom; Corporate Complicity in Chinese Internet Censorship*. Human Right Watch.

Watch, H. R. (2006, Agustus 10). *refworld: Race to the Bottom: Corporate Complicity in Chinese Internet Censorship*. Retrieved Maret 16, 2020, from Race to the Bottom: Corporate Complicity in Chinese Internet Censorship: <https://www.refworld.org/docid/45cb138f2.html>

Watch, H. R. (2018, April 2). *China: Free Anti-Censorship Activist*. Retrieved October 25, 2020, from Human Right Watch: <https://www.hrw.org/news/2018/04/02/china-free-anti-censorship-activist>

WawamuStats. (2018, November 5). *Top 10 Country GDP Ranking History (1960-2017)*. Retrieved Desember 15, 2020, from Youtube: <https://www.youtube.com/watch?v=wykaDgXoajc>

Wibowo, I. (2000). *Negara dan Masyarakat: berkaca dari pengalaman Republik Rakyat cina*. Jakarta : Gramedia pustaka Utama dan Pusat studi Cina .

Wines, M. (2011, May 4). *China Creates New Agency for Patrolling the Internet*. Retrieved Januari 30, 2021, from The New York Times : <https://www.nytimes.com/2011/05/05/world/asia/05china.html>

Wu, T. (2019). *China’s Online Censorship Stifles Trade, Too*. New York: The New York times.

Xu, K. H. (2013). *China ‘Employs 2 Million to Police Internet’*. CNN .